

# POTRET KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA KEDIRI

Editor: Maufur, MA



**KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DENGAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
TAHUN 2019**



# POTRET KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA KEDIRI

Oleh

**Ketua Tim:**

Dr. Wahidul Anam, M.Ag

**Anggota:**

Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag

Dr. Taufik Al Amin, M.Si

Dr. Khamim, MAg

Alim Khoiri, MA.g

Maufur, M.A

Dr. Noer Hidayah, M.Si.

Achmad Munif, MM

Ali Samsuri, M.EI

Zuhri Humaidi, M.S.I

Sukron Abadan, S.Kom

KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DENGAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
TAHUN 2019

# POTRET KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA KEDIRI

© 2021, Wahidul Anam

*All right reserved*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

**Penulis:** Dr. Wahidul Anam, M.Ag., Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag.,  
Dr. Taufik Al Amin, M.Si., Dr. Khamim, MAg., Alim Khoiri, M.Ag.,  
Maufur, M.A., Dr. Noer Hidayah, M.Si., Achmad Munif, MM.,  
Ali Samsuri, M.El., Zuhri Humaidi, M.S.I., Sukron Abadan, S.Kom.

**Editor:** Maufur, MA

**Layout:** Aura

**Desain Cover:** Audina

Cetakan: *Pertama 2021*

**ISBN :** 978-623-7682-03-5

Di Terbitkan oleh:

**IAIN Kediri Press**

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Telp.(0354) 689282, Fax (0354) 686564

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

## Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

# PENGANTAR

Pluralitas agama, kultur, dan etnisitas di Kota Kediri merupakan khazanah sosial yang sangat berharga, tidak saja untuk tujuan pragmatis seperti turisme, akan tetapi juga untuk kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu pengembangan masyarakat untuk keadilan, kesejahteraan dan perwujudan harkat manusia. Akan tetapi bertolak belakang dengan itu, jika tidak mampu dikelola secara baik, modalitas sosial tersebut akan menghadirkan malapetaka yang besar, seperti konflik SARA berlarut-larut yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Tentu kita tidak ingin kondisi semacam itu terjadi di Kota Kediri, yang sudah terlanjur menjadi pilot project Kerukunan Umat Beragama dan menyimpan narasi sejarah pencapaian harmoni antar agama, kultur dan etnisitas di masa lalu. Merawat dan mewujudkan kebinekaan adalah kerja besar yang sudah pasti harus diawali dengan pemahaman yang tepat dan menyeluruh mengenai kompleksitas persoalan yang dihadapi, seperti tradisi,

institusi, aktor, jejaring yang terbentuk, serta indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang terukur dari tahun ke tahun.

Untuk itu, BARENLITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan) Kota Kediri, bekerjasama dengan menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Kediri untuk menyusun “Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Kediri”. LPPM IAIN Kediri merasa bahagia mendapatkan tanggung-jawab ini. Oleh sebab itu, kami kemudian mencoba memperluas tujuan penelitian ini, tidak saja pada penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Kediri, akan tetapi juga pada upaya untuk memahami dan memetakan tradisi, institusi, aktor, serta jejaring yang terbentuk. Walaupun kerja akademik ini masih jauh dari sempurna, namun harapannya hasil ini bisa memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan agama di Kota Kediri. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada banyak pihak yang, secara langsung ataupun tidak, sudah memberikan sumbangsih bagi karya kecil ini, di antaranya BARENLITBANG Kota Kediri, Kemenag Kota Kediri, PAUB-PK, FKUB, PaLM dan semua informan dan responden penelitian yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua.

Kediri, 08 Oktober 2019

**Tim Peneliti IAIN**

Kediri

# Daftar Isi

<b>PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat .....	9
D. Kajian Terdahulu .....	10
<b>BAB 2</b>	
<b>KERANGKA TEORETIK</b> .....	<b>17</b>
A. Kerukunan Umat Beragama (KUB).....	17
B. Trilogi Kerukunan Umat Beragama .....	21
C. Toleransi .....	22
D. Kesetaraan .....	24
E. Kerjasama .....	25
F. Kebijakan .....	26

<b>BAB 3</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
	A. Fokus Penelitian.....	29
	B. Pengumpulan Data .....	30
	C. Pengolahan dan Analisis Data.....	33
<b>BAB IV</b>	<b>POTRET KEBERAGAMAN AGAMA</b>	
	<b>DI KOTA KEDIRI.....</b>	<b>35</b>
	A. Diskripsi Singkat .....	35
	B. Kehidupan Agama di Kota Kediri .....	42
<b>BAB 5</b>	<b>HASIL SURVEI DAN INDEKS KUB.....</b>	<b>57</b>
	A. Karakteristik Responden .....	57
	B. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	
	Berdasarkan Aspek dan Karakteristik	
	Responden .....	60
	C. Indeks KUB dan Aspeknya Berdasarkan	
	Kecamatan .....	64
	D. Indeks KUB Kota Kediri dan	
	Per Kecamatan .....	65
	E. Indeks KUB Berdasarkan Pertanyaan Pada	
	Tiap Variable .....	65
<b>BAB 6</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>79</b>
	A. Karakteristik Responden.....	79
	B. Indeks KUB: Beberapa Catatan Penting.....	81
<b>BAB 7</b>	<b>KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA</b>	
	<b>KEDIRI: PELUANG DAN TANTANGAN.....</b>	<b>87</b>
	A. Faktor Penunjang KUB .....	87
	B. Faktor Penghambat KUB.....	95



	C. Potensi Kerukunan dan Konflik.....	100
<b>BAB 8</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
	A. Kesimpulan .....	107
	B. Rekomendasi.....	108
	<b>REFERENSI.....</b>	<b>113</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>117</b>



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama, dalam konteks sejarah Indonesia modern, senantiasa memainkan peran publik yang penting dan hampir selalu menjadi faktor determinan yang terus dikaji dalam setiap upaya menciptakan kondisi kerukunan dan kedamaian, khususnya pasca-reformasi 1998. Keterbukaan politik dan informasi pasca-reformasi 1998, di satu sisi menerbitkan harapan akan perubahan ke arah demokratisasi sosial dan politik, serta kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, namun di sisi lain reformasi ternyata mendorong peran agama yang lebih sektarian dan vulgar di ruang publik. Indikator fenomena tersebut bisa sangat beragam, mulai dari konflik besar di antara komunitas Muslim dan Kristen di beberapa tempat; pemboman di Jakarta dan Bali dengan korban ratusan orang; pembakaran masjid di Tolikara; munculnya perda syariah di beberapa wilayah Indonesia, yang diikuti dengan trend labelisasi produk

makanan dan pakaian; kemunculan gerakan-gerakan baru seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Salafi; politisasi agama pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017 kemarin; maraknya vigilantisme oleh sejumlah organisasi berlabel agama; serta kasus-kasus lain yang sejenis, cukup membuat sejumlah pengamat, aktivis dan pemerintah khawatir akan kendala besar bagi terwujudnya kerukunan dan toleransi di masa-masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Dengan begitu, apakah agama harusnya tidak boleh tampil mempengaruhi kehidupan publik? Apakah agama akan selalu menjadi batu sandung bagi proses demokratisasi, terutama bagi negara seperti Indonesia yang baru memulai tahapan awal dari proses tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini telah menghiasi inti perdebatan publik intelektual sejak dasawarsa terakhir. Umumnya, seperti dirumuskan Lutfhi Assyaukanie, publik politik dan intelektual di Indonesia menolak dasar negara yang berlandaskan agama tertentu, akan tetapi dengan keyakinan yang sama kuatnya bahwa peran agama sangat penting dalam kehidupan sosial, politik dan pemerintahan.<sup>2</sup> Berbeda halnya dengan pengalaman negara-negara barat yang sekuler, aspirasi religius merupakan fondasi falsafah kenegaraan dan kebangsaan yang tidak bisa dinafikan keberadaannya, karena itu

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin Bagir, "Membaca beragam wajah Islam di Indonesia", dalam Martin van Bruinessen, *Conservative Turn; Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, (Bandung; Mizan Pustaka, 2014), hlm. 17-18.

<sup>2</sup> Lutfhi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia; Tiga model negara demokrasi di Indonesia*, (Jakarta; Freedom Institute, 2011).

pelembagaannya menuntut “campur tangan” negara, seperti pendirian Kementerian Agama, FKUB dan berbagai RUU Keagamaan.

Lantas, bagaimanakah potret kerukunan umat beragama di Indonesia pada tahun-tahun terakhir, mengawatirkan ataukah membanggakan? Laporan dari berbagai organisasi masyarakat sipil maupun lembaga pemerintah umumnya memperlihatkan dua wajah yang seakan-akan bertentangan. Menurut survei yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama, indeks kerukunan umat beragama di Indonesia selama kurun 2016 berada pada 75,47 persen.<sup>3</sup> Angka itu naik 0,11 persen ketimbang tahun 2015, yakni sebesar 75,36 persen.<sup>4</sup> Kerukunan umat beragama di Indonesia semakin membaik, hal ini setidaknya terlihat dari tingginya indeks toleransi dan kesetaraan, meskipun masih lemah di wilayah kerjasama antar umat beragama. Sejalan dengan ini, pernyataan dari tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah, maupun tokoh dunia seperti Obama dan Hillary Clinton, menegaskan tingginya tingkat kerukunan agama di Indonesia, yang juga bermakna keberhasilan sintesis Islam dan demokrasi karena populasi Muslim Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.

---

<sup>3</sup> Raudatul Ulum, Budiyono (Editor), *Survey Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2016*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2017).

<sup>4</sup> Raudatul Ulum, Budiyono (Editor), *Survey Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016).

Sedangkan laporan dari beberapa organisasi sipil, seperti Laporan Tahunan CRCS (*Center for Religious and Cross-cultural Studies*) UGM, The Wahid Institute, PUSAD Paramadina, Setara Institute, dan lain-lain mengemukakan tesis yang sebaliknya; relasi antar agama di Indonesia dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Pada 2017, publik di Indonesia menyaksikan berkembangnya politisasi agama dalam bentuknya yang paling vulgar, meningkatnya *hate speech* (ujaran kebencian) berlatar SARA, politisasi UU No.1/PNPS/1965 tentang penodaan agama, vigilantisme dari berbagai organisasi berlabel agama, serta kegagalan negara di dalam melindungi minoritas.<sup>5</sup> Pada 2019, kehidupan politik keagamaan semakin mengkhawatirkan. Perhelatan Pemilu 2019 ditandai dengan pembelahan politik yang diwarnai dengan friksi ideologi keagamaan. Masyarakat Indonesia seakan-akan terbelah menjadi dua kubu yang saling menebar ujaran kebencian, *hoax*, dan tidak jarang persekusi terhadap kelompok yang berbeda. Semua hasil penelitian di atas yang tampaknya mengajukan tesis yang berbeda-beda, sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu

---

<sup>5</sup> Zainal Abidin Bagir dkk, *Kerukunan dan Penodaan Agama, Alternatif Penanganan Masalah*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM, 2017); Suhadi, *Kebebasan akademik dan ancaman yang meningkat*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM, 2017); Ihsan Fauzi, dkk, *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme ;Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017); Ismail Hasani, *Indeks Hak Asasi Manusia tahun 2014*, (Jakarta; Setara Institute, 2014); The Wahid Institute, "Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan", [http://www.wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan\\_sementara\\_kbb2015.pdf](http://www.wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan_sementara_kbb2015.pdf)

sama lain. Keseluruhannya membentuk narasi tentang wajah kehidupan keagamaan di Indonesia yang *multiface* dan multidimensi. Kenyataan masih adanya tradisi pluralisme dan toleransi agama yang kuat di Indonesia, berjalan seiring dengan semakin meningkatnya kendala dan tantangan.<sup>6</sup> Hal tersebut meniscayakan kebutuhan kerja akademik yang serius dan berkelanjutan untuk memetakan potret kehidupan umat beragama yang tersebar luas di daerah-daerah, seperti Kota Kediri. Spesifikasi dan detail data diperlukan untuk merumuskan kerja-kerja lanjutan yang lebih terprogram.

Kediri sendiri merupakan salah satu daerah, terdiri dari kabupaten dan kota, di Jawa Timur yang relatif plural dan secara intens bersentuhan dengan dunia luar. Dalam konteks historis, Kediri dibangun sejak masa Raja Airlangga di abad 11 M dan setelah itu dibentuk oleh silih bergantinya kekuasaan raja-raja Jawa, VOC, Hindia Belanda dan Indonesia. Sebagai salah satu pusat kekuasaan politik dan ekonomi, Kediri dihidupi oleh berbagai anasir sosial dan budaya, serta aktif menjalin kontak dengan dunia luar. Atau dengan kata lain, kepelbagaian dalam semua aspeknya, seperti agama, etnisitas, tradisi, bahasa, teknologi, politik dan ekonomi, merupakan identitas yang tak terpisahkan

---

<sup>6</sup> Amy Gutmann mengatakan bahwa identitas yang berbasis agama tidak selalu bertentangan dengan demokrasi. Keduanya setidaknya bertemu dalam komitmen penghargaan terhadap individu. Baik agama maupun demokrasi memiliki komitmen penghormatan terhadap individu sehingga memungkinkan terjadinya titik temu keduanya. Amy Gutmann, *Identity in Democracy* (New Jersey: Princeton University Press, 2003), hlm. 207-210.

dari Kediri. Apalagi semenjak dibukanya industri gula dan rokok terbesar di Indonesia, intensitas pertemuan, percampuran, dan tidak jarang gesekan antar beragam unsur tersebut semakin tampak terlihat. Kediri menjadi *melting pot* (belanga peleburan) bagi kepelbagaian tersebut yang tetap eksis hingga saat ini.<sup>7</sup>

Dalam hal agama, mayoritas penduduk Kediri, khususnya Kota Kediri, beragama Islam. Penganut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuchu, dan penganut kepercayaan berkembang dengan cukup signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah pemeluknya, tempat-tempat ibadah,<sup>8</sup> dan keaktifan mereka dalam organisasi-organisasi lintas iman.<sup>9</sup> Bahkan Klenteng Tjio Hwie Kiong milik Konghuchu, candi Setono Gedung peninggalan Hindu-Muslim, dan Gereja Merah GPIB menjadi ikon penting wisata sejarah di Kediri. Kemajemukan agama merentang jauh berabad-abad

---

<sup>7</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia modern; 1200 M – 2004 M*, (Jakarta; Serambi, 2001). *Melting Pot* merupakan konsep yang sangat penting dalam Teori Multikulturalisme. Lihat Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism; Cultural diversity ang political theory*, (Boston; Harvard University Press, 2002).

<sup>8</sup> Dari enam agama yang diakui, Islam adalah agama yang paling banyak dianut di Kota Kediri. Sebanyak 91,45 persen penduduk adalah Muslim. Agama terbesar kedua adalah Kristen dengan penganut 5,72 persen. Sementara itu jumlah penganut agama Katholik mencapai 2,29 persen dan 0,54 persen sisanya adalah penduduk yang beragama Hindu, Budha, Khonghucu, dan penganut kepercayaan. Tim BPS Kota Kediri, *Kota Kediri dalam Angka; Kediri municipality in figures 2017*, (Kediri; BPS Kota Kediri, 2017), hlm. 98.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Taufiq Alamin, Ketua Paguyuban Lintas Masyarakat (PALM) Kota Kediri, tanggal 19 Maret 2018.



sampai sekarang dan tumbuh menjadi kekuatan yang patut dibanggakan.

Akan tetapi, sama seperti problem relasi antar agama di tingkat nasional yang didiskripsikan di paragraf-paragraf sebelumnya. Di satu sisi, kemajemukan menjadi ciri dari masyarakat yang dinamis dan maju, di sisi lain ia dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kendala yang serius. Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kemenag RI di Jawa Timur tahun 2011 mencatat beberapa hal; 1) Kediri merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur di mana komunitas Ahmadiyah dan Syi'ah mengalami tekanan dan persekusi oleh kelompok lain; 2) Adanya keresahan masyarakat menyangkut penyebaran agama oleh kelompok tertentu kepada muslim abangan di Mojo, suatu daerah di luar yurisdiksi Kota Kediri akan tetapi cukup dekat dan berpengaruh.<sup>10</sup>

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh LP2M IAIN Kediri 2018 menyimpulkan bahwa Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kota Kediri berjalan dengan baik. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kota Kediri berada di angka **3.76** (baik), yang berarti mencerminkan bahwa secara umum Kota Kediri adalah kota yang kondusif bagi terciptanya kerukunan umat beragama. Berdasarkan kecamatan, Pesantren memperoleh Indeks KUB tertinggi

---

<sup>10</sup> Haidlor Ali Ahmad (Editor), *Potret Kerukunan Umat Beragama di Jawa Timur Tahun 2011*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011). Bandingkan juga dengan Ahmad Subakir, dkk, *Potret Buram Kebebasan beragama*, (Kediri; STAIN Kediri & Nadi Pustaka, 2010).

(3.85), disusul Kota (3.75), dan Mojoroto (3.66). Indeks KUB di tiga kecamatan ini termasuk tinggi dengan selisih yang tidak terlalu signifikan. Dari empat variabel yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu toleransi, kesetaraan, kerjasama dan kebijakan, semuanya mendapatkan angka yang tinggi dengan rincian; Toleransi = 3.68, Kesetaraan = 3.91, Kerjasama = 3.52, dan Kebijakan = 3.96. Namun di sisi lain, masih ada potensi terjadinya konflik, misalnya masih ada responden yg setuju terhadap radikalisme agama (1,43), atau yg bersikap netral (3.57), atau terhadap kelompok sempalan seperti Ahmadiyah dan Syi'ah; yang tidak setuju 17.85, dan yg netral (57.14). Beberapa persoalan lain juga dielaborasi dalam penelitian ini, seperti maraknya hoax dan ujaran kebencian, politik Identitas, kesenjangan ekonomi, regenerasi tokoh dan aktifis lintas agama di Kota Kediri tidak berjalan dengan memuaskan, deseminasi isu KUB kurang meluas, serta stigma dan kecurigaan terhadap kelompok sempalan, seperti Ahmadiyah dan Syi'ah masih kuat.<sup>11</sup>

Diskripsi penelitian tersebut sesungguhnya menandai potret kehidupan umat beragama yang kompleks dan dinamis. Problematika relasi antar agama di tingkat nasional sebetulnya juga terjadi dan menjadi gejala umum yang bisa dirasakan di Kota Kediri, meskipun dalam skala yang berbeda. **Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba memetakan, mengukur dan menganalisis kerukunan umat**

---

<sup>11</sup> LP2M IAIN Kediri, *Indeks Kerukunan Umat beragam Di Kota Kediri Tahun 2018, Laporan tidak diterbitkan*, (Kediri: Pemerintah Kota Kediri dan IAIN Kediri, 2018).

**beragama di Kota Kediri tahun 2019 untuk memperoleh indeks kerukunan umat beragama di Kota Kediri.** Hal itu diperlukan sebagai batu pijakan lahirnya regulasi, program, dan aktivitas bagi pemerintah maupun organisasi sipil. Kerukunan bukanlah sebuah barang jadi atau suatu bentuk kondisi yang permanen. Kerukunan bergerak dalam proses secara dinamis sesuai kondisi atau dinamika yang berkembang di masyarakat, sehingga diperlukan penelitian yang serius dan berkelanjutan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Seberapa tinggi tingkat kerukunan umat beragama di Kota Kediri tahun 2019?
2. Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap kerukunan umat beragama di Kota Kediri tahun 2019, potret persoalan yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Mendapatkan data tentang variasi tingkat kerukunan umat beragama di Kota Kediri.
2. Menggali faktor yang berpengaruh terhadap hubungan antarumat beragama tersebut.
3. Memberikan informasi kepada pemerintah Kota Kediri tentang tingkat kerukunan dan sekaligus kerawanan berkaitan dengan masalah hubungan antarumat beragama di daerahnya.

4. Memberikan gambaran peta indeks kerukunan umat beragama di Indonesia yang terintegrasi dalam bentuk data GIS (*Geographic Information Systems*).

#### **D. Kajian Terdahulu**

Terdapat beberapa literatur maupun kajian yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa di antaranya ialah; “*Survey Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015*”. Penelitian ini atas prakarsa Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Survey tahun 2015 tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kondisi kerukunan antar umat beragama secara nasional baik, dengan tingkat angka rata-rata tinggi, yakni sebesar 75,36 persen.<sup>12</sup> Survey di tahun berikutnya, menghasilkan kesimpulan bahwa indeks kerukunan umat beragama di Indonesia selama kurun 2016 berada pada 75,47 persen, naik 0,11 persen.<sup>13</sup>

Di tahun sebelumnya, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI juga pernah melakukan penelitian serupa, hanya saja skala survey yang dilaksanakan tertentu di daerah Jawa Timur. Penelitian berjudul “*Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011*” ini menghasilkan kesimpulan bahwa kondisi kerukunan di 12 wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur pada umumnya dipandang relatif kondusif,

---

<sup>12</sup> Raudatul Ulum, Budiyono (Editor), *Survey Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015*.

<sup>13</sup> Raudatul Ulum., *Survey Kerukunan*.

artinya tak ada konflik atau benturan sosial yang bersifat terbuka. Angka penilaian responden sebesar 3,58 dengan menggunakan penilaian dari 1-5 dapat dikategorikan berada pada tingkat kerukunan yang baik.<sup>14</sup>

Selain itu, terdapat pula hasil penelitian berjudul "*Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2012*". Penelitian ini dilakukan oleh tim CRCS (Center for Religious and Cross-Cultural Studies) UGM Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, tim peneliti fokus pada tiga hal. *Pertama*, aspek kebebasan beragama dan toleransi. *Kedua*, persoalan tuduhan penistaan agama dan yang *ketiga*, menyoroti masalah rumah ibadah.<sup>15</sup> Tim CRCS UGM Yogyakarta sebelumnya juga menerbitkan hasil penelitian berjudul "*Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*". Penelitian ini fokus pada aspek penodaan/ penyimpangan agama dan rumah ibadah. Di akhir kesimpulan, tim peneliti merumuskan temuan bahwa di tahun tersebut kondisi keberagamaan cenderung menurun, artinya terdapat banyak persoalan maupun gesekan antar umat beragama seperti kasus Jema'at Ahmadiyah dan yang lainnya. Tim peneliti kemudian merekomendasikan beberapa hal sebagai solusi atas berbagai macam permasalahan kerukunan beragama, di antaranya adalah perlu ketegasan dari pemerintah dan optimalisasi peran dari organisasi keagamaan dan sosial

---

<sup>14</sup> Haidlor Ali Ahmad (Editor), *Potret Kerukunan Umat Beragama di Jawa Timur Tahun 2011*.

<sup>15</sup> Zainal Abidin Bagir, dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM, 2012), hlm. 51.

kemasyarakatan.<sup>16</sup> Terbaru, di tahun 2017 tim CRCS UGM menghasilkan penelitian berjudul "*Kerukunan dan Penodaan Agama, Alternatif Penanganan Masalah*". Dalam laporannya, tim ini kemudian menawarkan beberapa solusi dalam mengatasi problem kerukunan dan penodaan agama. Di antaranya ialah; *pertama*, dengan pendekatan kekuasaan untuk memaksa pihak yang bertikai supaya berdamai. *Kedua*, penyelesaian konflik dengan mengacu norma-norma tertentu, dan yang terakhir adalah dengan menggunakan pendekatan berbasis kepentingan bersama.<sup>17</sup>

Dalam bentuk buku yang lain, ditemukan pula buku bertema "*Kebebasan, Toleransi dan Terorisme (Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia)*". Buku ini berisi delapan esai yang semula ditulis untuk didiskusikan dalam kelompok kecil yang disebut kelompok kerja "*Riset dan Kebijakan terkait Kehidupan Agama di Indonesia*". Kelompok ini melibatkan para peneliti, pengambil kebijakan dan para pegiat lembaga swadaya masyarakat. Salah satu kesimpulan dalam riset yang termuat dalam buku ini adalah bahwa kerukunan umat beragama dapat terwujud, manakala kebebasan beragama kelompok masyarakat tertentu berbasis pada penghormatan atas nilai-nilai dominan yang dianut bersama

---

<sup>16</sup> Zainal Abidin Bagir, dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM, 2011), hlm. 78.

<sup>17</sup> Zainal Abidin Bagir, dkk, *Kerukunan dan Penodaan Agama, Alternatif Penanganan Masalah*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM, 2017), hlm. 12.

dan pengutamaan pada hak-hak komunal pada masyarakat Indonesia.<sup>18</sup>

Berikutnya, terdapat riset berupa buku berjudul "*Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia; Sejarah, Teori dan Advokasi*". Sesuai dengan temanya, penelitian dalam buku tersebut mengkaji beberapa isu konseptual terkait dengan bagaimana memahami situasi pengelolaan keragaman Indonesia, termasuk soal kebebasan beragama.<sup>19</sup>

Riset yang lebih spesifik dilakukan oleh LP2M IAIN Kediri pada tahun 2018 berjudul "*Indeks Kerukunan Umat beragama di Kota Kediri Tahun 2018*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kota Kediri berjalan dengan baik. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kota Kediri berada di angka **3.76** (baik), yang berarti mencerminkan bahwa secara umum Kota Kediri adalah kota yang kondusif bagi terciptanya kerukunan umat beragama. Namun di sisi lain, masih ada potensi terjadinya konflik, misalnya masih ada responden yg setuju terhadap radikalisme agama (1,43), atau yg bersikap netral (3.57), atau terhadap kelompok sempalan seperti Ahmadiyah dan Syi'ah; yang tidak setuju 17.85, dan yg netral (57.14). Beberapa persoalan lain juga dielaborasi dalam

---

<sup>18</sup> Ihsan Ali Fauzi, dkk, *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme; Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017), hlm. 117.

<sup>19</sup> Robert W. Hefner, Ihsan Ali Fauzi, *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia; Sejarah, Teori dan advokasi*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya UGM, 2014), hlm. 6

penelitian ini, seperti maraknya hoax dan ujaran kebencian, politik Identitas, kesenjangan ekonomi, regenerasi tokoh dan aktifis lintas agama di Kota Kediri tidak berjalan dengan memuaskan, deseminasi isu KUB kurang meluas, serta stigma dan kecurigaan terhadap kelompok sempalan, seperti Ahmadiyah dan Syi'ah masih kuat.<sup>20</sup>

Berikutnya, terdapat riset berupa buku berjudul "*Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia; Sejarah, Teori dan Advokasi*". Sesuai dengan temanya, penelitian dalam buku tersebut mengkaji beberapa isu konseptual terkait dengan bagaimana memahami situasi pengelolaan keragaman Indonesia, termasuk soal kebebasan beragama.<sup>21</sup>

Beberapa literatur dan riset sebagaimana dijelaskan di atas hampir seluruhnya berkaitan dengan persoalan keragaman dan kerukunan umat beragama. Hanya saja obyek penelitian masih sebagian besar berskala nasional. Survey yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan misalnya, riset tersebut mencakup seluruh wilayah yang ada di Indonesia, termasuk Jawa Timur. Akibatnya, kesimpulan survey yang dimunculkannya pun bersifat nasional.

---

<sup>20</sup> Tim LP2M IAIN Kediri, *Indeks Kerukunan Umat beragama di Kota Kediri Tahun 2018, Laporan tidak diterbitkan*, (Kediri: Pemerintah Kota Kediri dan IAIN Kediri, 2018)

<sup>21</sup> Robert W. Hefner, Ihsan Ali Fauzi, *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia; Sejarah, Teori dan advokasi*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya UGM, 2014), hlm. 6



Demikian pula riset yang dilakukan tim peneliti, baik dari CRCS maupun Paramadina, selain masih belum secara rinci merujuk pada daerah tertentu, beberapa survey di atas juga cenderung hanya menggunakan instrumen yang masih bersifat nasional dan menyoroti beberapa sisi persepsi saja belum fokus pada aspek kerukunan secara komprehensif. Riset yang lebih spesifik dilakukan oleh LP2M IAIN Kediri pada tahun 2018, sebagaimana sudah diuraikan di atas. Penelitian berjudul “Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Kediri Tahun 2019” ini merupakan kelanjutan dari Indeks tahun 2018. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi keberagamaan dan kerukunan umat beragama di Kota Kediri, setelah berbagai peristiwa penting yang terjadi di tahun 2018 dan 2019, khususnya momentum Pemilu 2019 yang sangat berpengaruh di lingkup nasional maupun lokal.



## BAB 2

# KERANGKA TEORETIK

### A. Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Secara leksikal, kerukunan berarti 'perihal hidup rukun', sementara asal katanya 'rukun' bermakna 'baik dan damai, tidak bertentangan'; 'bersatu hati, bersepakat'.<sup>22</sup> Di Indonesia, istilah kerukunan kerap kali disinonimkan dengan kata 'harmoni' atau 'toleransi' dan dipakai sebagai bahasa etika pergaulan. Sebuah kondisi atau tatanan sosial dikatakan rukun, menurut Niels Mulder, apabila ia berada dalam "keadaan selaras", "tenang dan tenteram", "tanpa perselisihan dan pertentangan", dan "bersatu dalam maksud untuk saling membantu".<sup>23</sup> Franz Magnes-Suseno, sebagaimana dikutip Masdar Hilmy, mengartikan kerukunan sebagai keseimbangan sosial (*social equilibrium*),

---

<sup>22</sup> WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1980), hlm.106.

<sup>23</sup> Niels Mulder, *Mysticism and Everyday Life in Cotemporary Java: Cultural Persistence and Change*, (Singapore: Singapore University Press, 1978), hlm. 39.

yaitu kondisi yang dicirikan dengan kemauan dari berbagai pihak untuk hidup damai, bekerjasama, dan saling menerima satu sama lain.<sup>24</sup> Dengan demikian, kerukunan adalah kondisi ideal yang dicita-citakan bersama karena sejalan dengan kecenderungan alamiah manusia.

Dalam kaitannya dengan agama, banyak definisi telah diberikan oleh para ahli, sekalipun dengan penekanan yang berbeda.<sup>25</sup> Untuk tujuan penelitian ini dan sekaligus sebagai landasan yuridis, definisi Kerukunan Umat Beragama didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006. Menurut Peraturan Bersama ini, Kerukunan Umat Beragama diartikan sebagai: "Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam

---

<sup>24</sup> Masdar Hilmy, "Prolog", dalam Haidlor Ali., *Potret Kerukunan Umat Beragama.*, xii

<sup>25</sup> Misalnya, Mukti Ali menekankan pada kondisi sosial dengan mengartikan kerukunan umat beragama sebagai "Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai." Hasbullah Bakri memberikan pengertian yang lebih praktis sebagai ko-eksistensi secara damai antara satu atau lebih golongan agama dalam kehidupan beragama." Amir Syarifuddin lebih menekankan pada pluralitas agama, "mempertemukan, atau mengatur hubungan luar antara orang-orang berlainan agama dalam proses bermasyarakat, jadi kerukunan antarumat beragama tidak berarti menyatukan agama-agama yang berbeda." Lihat Raudatul Ulum., *Survey Kerukunan Umat Beragama.*, hlm. 8-9.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>26</sup> Berangkat dari pengertian ini pemerintah menggunakan tiga variabel utama (toleransi, kesetaraan, dan kerjasama) dalam mengukur kerukunan umat beragama di Indonesia.

Ditilik dari sejarahnya, asal muasal penggunaan istilah Kerukunan Umat Beragama bisa dilacak sejak diselenggarakannya Musyawarah Antar Agama Musyawarah Antar Umat Beragama oleh pemerintah pada tanggal 30 Nopember 1967 di Gedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta. K.H.M. Dachlan, Menteri Agama Republik Indonesia saat itu, mengangkat istilah kerukunan dalam konteks agama-agama. Dalam pidato sambutannya, sebagaimana dikutip Weinata Sairin, ia mengatakan “adanya kerukunan antara golongan beragama merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program kabinet Ampera.”<sup>27</sup> Sejak saat, kerukunan umat beragama menjadi bahasa baku pemerintah dalam berbagai peraturan perundangan dan keputusan-keputusan pemerintah hingga saat ini.

---

<sup>26</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Bab I, pasal 1, ayat 1., hlm. 10.

<sup>27</sup> Weinata Sairin (ed.), *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-Butir Pemikiran*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), ix

Dalam perjalanannya, penggunaan istilah “Kerukunan Umat Beragama” dalam ranah kebijakan bukan tanpa persoalan. Masalah pertama terkait dengan kebebasan beragama. Sebagian kalangan menganggap regulasi kerukunan umat beragama dalam praktiknya malah mengebiri dan membatasi kebebasan beragama yang menjadi hak asasi individu yang pemenuhannya tidak bisa ditunda-tunda (*non derogable rights*). Persoalan lain menyangkut pembatasan “Umat Beragama” pada agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah, padahal realitas menunjukkan banyaknya aliran kepercayaan di Indonesia. Bagi kalangan yang tidak puas dengan istilah kerukunan umat beragama, istilah Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dianggap lebih tepat.

Terlepas dari problem ini, penelitian ini tetap menggunakan “Kerukunan Umat Beragama (KUB)” karena beberapa alasan: *pertama*, istilah ini lebih berterima di level masyarakat awam dan juga pengambil kebijakan. *Kedua*, istilah Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) berpijak pada paradigma sekular-liberal yang belum tentu sejalan dengan tradisi dan nilai-nilai agama yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. *Ketiga*, penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa kedua pendekatan tidak harus dipertentangkan secara diametral, melainkan dipadukan sehingga bisa saling melengkapi satu sama lain.

## B. Trilogi Kerukunan Umat Beragama

Konsep trilogi kerukunan umat beragama dilontarkan pertama kali oleh Menteri Alamsyah Ratu Perwira Negara sebagai pengembangan gagasan pendahulunya, Mukti Ali, tentang kerukunan agama berbasis 'setuju dalam perbedaan' (*agree in disagreement*). Konsep Trilogi Kerukunan ini secara garis besar mencakup: (1) Kerukunan intern umat beragama; (2) Kerukunan antar umat beragama; dan (3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Semasa kepemimpinan Menteri Agama Munawir Sjadzali, konsep trilogi kerukunan ini kemudian diistilahkan dengan Tri Kondial (Tiga Kondisi Ideal) kerukunan umat beragama.<sup>28</sup> Konsep ini menjadi pilar pengembangan kerukunan umat beragama di masa Order Baru.

Penerapan konsep Trilogi Kerukunan di era Alamsyah ini sekaligus menandai awal kontrol Orde Baru terhadap kehidupan keagamaan di Indonesia. Dalam bingkai trilogi kerukunan ini, rezim Order Baru menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur urusan agama hingga persoalan yang sangat teknis seperti kuliah subuh melalui siaran radio, tatacara dan konten dakwah.<sup>29</sup> Kerukunan umat beragama dibangun atas konstruk ketertiban umum dan stabilitas politik rezim pada waktu itu. Trilogi Kerukunan ini pada praktiknya menjadi alat ampuh pemerintah untuk

---

<sup>28</sup> Imam Talkhah, "Prolog", dalam Haidlor Ali. (ed.), *Survey Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013), xvi.

<sup>29</sup> Ismatu Ropi, *Religion and Regulation in Indonesia*, (Singapore: Palgrave Macmillan, 2017), hlm. 147.

mengontrol dan membatasi kebebasan beragama demi alasan ketertiban umum dan stabilitas politik. Selama demi terwujudnya kerukunan, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan membatasi aktivitas keagamaan hingga ke wilayah yang privat sekalipun, seperti perkawinan beda agama yang dianggap mengganggu harmoni rumah tangga.

Terlepas dari kepentingan politik yang menyertai penerapannya selama rezim Orde Baru, konsep Trilogi Kerukunan ini masih relevan untuk mengukur indeks kerukunan umat beragama di tengah pluralitas Indonesia saat ini. Dengan meminjam tiga model kerukunan ini—intern umat beragama, antar umat beragama, serta umat beragama dan pemerintah—penelitian ini akan mengangkat isu-isu kontroversial yang dianggap menjadi titik tegang antara kerukunan dan kebebasan beragama sekaligus pemicu intoleransi keagamaan, seperti penodaan agama, perayaan dan peringatan Hari Besar Keagamaan, penyebarluasan agama (penyiaran agama dan pendidikan agama), pemakaman jenazah, dan pendirian tempat ibadah.

### **C. Toleransi**

Pembicaraan mengenai kerukunan tidak bisa dilepaskan dari toleransi. Toleransi adalah tulang punggung kerukunan. Toleransi, menurut KBBI, berarti “sikap/sifat menenggang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian



sendiri.<sup>30</sup> Menurut UNESCO, toleransi mengacu pada rasa hormat, penerimaan, dan penghargaan atas keragaman budaya dunia yang kaya, berbagai bentuk ekspresi diri, dan cara-cara menjadi manusia. Toleransi adalah kerukunan dalam perbedaan. Powel dan Clark, sebagaimana dikutip Rina Hermawati dkk., mengartikan toleransi sebagai sikap membiarkan suatu perbuatan sekalipun kita sendiri berkeberatan.<sup>31</sup>

Bila dihubungkan dengan agama, toleransi beragama (*religious tolerance*) bisa diartikan sebagai keyakinan, pemikiran maupun sikap atau perilaku toleransi terhadap umat beragama lain baik perorangan maupun kelompok.<sup>32</sup> Barangkali, makna toleransi beragama bisa lebih jelas apabila dihubungkan dengan lawan katanya, intoleransi beragama. Menurut Wahid Institute, intoleransi beragama (*religious intolerance*) bisa berupa (1) prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktik keagamaan tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok; (2) Tindakan intimidasi atau kekerasan dengan motif utama pengabaian hak seseorang atau kelompok dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas hak-hak fundamental pemeluk agama; dan (3) propaganda,

---

<sup>30</sup> Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, hlm. 184

<sup>31</sup> Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati, "Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung," *UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology*, Volume 1 (2) Desember 2016, hlm. 108.

<sup>32</sup> Ahsanul Khalikin dan Fathuri (ed.), *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 12

ungkapan/pernyataan kebencian, dan atau bentuk-bentuk lain yang bisa digunakan untuk menyebarkan faham-faham ideologis diskriminatif.

Variabel yang bisa dipakai untuk mengukur kesetaraan adalah: (1) Menghormati: Kesiediaan untuk menghargai; Menghargai dan menghormati; Berhati-hati terhadap hak orang lain; (2) Penerimaan (menerima): Memberi kesempatan berinteraksi pada orang yang berbeda; Menciptakan kenyamanan; Tidak menggunakan kekuatan dan paksaan terhadap kepercayaan dan praktek yang menyimpang; Penghargaan pada keragaman budaya; Mengenali sikap tidak toleran (3) Jujur: Jujur terhadap perbedaan; (4) Teladan: Bersikap sebagai contoh; Sabar membiarkan orang lain menjalankan agamanya; Memberi kesempatan berinteraksi kepada orang lain yang berbeda.<sup>33</sup>

#### **D. Kesetaraan**

Bagi Diana L. Eck, kesetaraan haruslah terkandung dalam toleransi. Toleransi tanpa kesetaraan akan berakhir pada pengeangan atau pengendalian terhadap liyan.<sup>34</sup> Kesetaraan mengasumsikan bahwa setiap orang adalah sama sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, UUD 1945 menegaskan prinsip kesetaraan dalam urusan agama. Artinya, semua warga negara harus memiliki kesempatan

---

<sup>33</sup> Raudatul Ulum, *Survey Kerukunan Umat Beragama.*, hlm. 12.

<sup>34</sup> Diana L. Eck, *A New Religious America: How a "Christian Country" Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation*, (San Fransico: Harper San Fransisco, 2001), hlm. 70.

yang sama untuk menjalankan berbagai aktivitas keagamaannya, tidak boleh ada pengistimewaan dan diskriminasi.<sup>35</sup> Namun di era multikulturalisme, kesetaraan kadang menjadi problematik terutama bila dibingkai dalam relasi mayoritas dan minoritas. Kelompok pertama merasa memiliki *privilege* yang harus ditoleransi oleh pihak kedua. Toleransi seperti ini sama dengan pemaksaan dan tak jarang memicu konflik.

Variabel yang bisa dipakai untuk mengukur kesetaraan adalah: (1) Tingkatan Yang Sama: Tidak ada superioritas; Tidak diskriminatif; Hubungan timbal balik; (2) Punya Kesempatan Yang Sama: Memberi kebebasan melakukan aktifitas keagamaan bagi orang lain; Berhati-hati (menjaga) terhadap hak orang lain; (3) Perlindungan: Perlindungan terhadap perbedaan (agama); Perlindungan terhadap penghinaan (agama).<sup>36</sup>

## E. Kerjasama

Kerjasama (*cooperation*) adalah pilar lain dari kerukunan. Kerjasama terjadi karena adanya kesadaran akan

---

<sup>35</sup> Lihat UUD 1945 Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”; Pasal 28E ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”, dan Pasal 28E ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

<sup>36</sup> Raudatul Ulum, *Survey Kerukunan Umat Beragama.*, hlm. 12.

kesamaan kepentingan dan keinginan untuk bersama-sama mewujudkan kepentingan tersebut. Dalam konteks agama, kerjasama adalah bagian dari dialog agama di tingkat kehidupan nyata (*dialogue of life*) yang diarahkan pada penyelesaian persoalan-persoalan aktual sehari-hari yang menjadi perhatian bersama. J.B. Banawiratma mengartikan kerjasama agama sebagai aksi bersama (*dialogue in action*) untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.<sup>37</sup> Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, kerjasama adalah modal atau bahkan prasyarat utama untuk mengukuhkan ikatan kewargaan (*civic engagement*). Ia membagi kerjasama dalam dua aspek: keseharian (*quotidian*) dan partisipasi dalam perkumpulan (*associational*).<sup>38</sup> Meminjam konsep ikatan kewargaan ala Varshney ini, kerjasama agama bisa diukur dengan melihat tingkat partisipasi warga dalam (1) Hubungan Sosial dan (2) Keanggotaan Asosional.

## F. Kebijakan

Dalam kerangka Trilogi Kerukunan, pemerintah menjadi bagian penting dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, dengan tegas menyatakan bahwa pemeliharaan kerukunan

---

<sup>37</sup> J. B. Banawiratman, S.J., "Bersama Saudara Saudari Beriman Lain", dalam Abdurrahman Wahid, dkk., *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), hlm. 26.

<sup>38</sup> Varshney, A. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*, (London: Yale University Press, 2012).

umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebagai pemangku otoritas dan pengambil kebijakan (*policy-making*), pemerintah di satu sisi diharapkan aktif dalam merawat dan memelihara kerukunan umat beragama melalui regulasi-regulasi. Tapi di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk berperan sebagai wasit melalui keputusan-keputusan yang adil dan tidak mencederai kebebasan agama. Peran strategis pemerintah bisa diukur dari sejauh mana pemerintah (1) Mengelola keragaman melalui regulasi; (2) Memelihara kerukunan umat beragama; dan (3) Menyikapi konflik bernuansa agama.



## **BAB 3**

# **METODE PENELITIAN**

### **A. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah menentukan tingkat kerukunan beragama di Kota Kediri dan mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kerukunan agama di Kota Kediri. Pertama, penelitian ini akan menentukan indeks kerukunan beragama di Kediri yang disajikan dalam bentuk data statistik dan analisisnya. Selanjutnya, penelitian ini akan memberikan paparan eksplanatif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kerukunan agama di Kota Kediri.

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Kediri akan difokuskan pada empat variabel utama: toleransi, kesetaraan, kerjasama, dan kebijakan sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka konseptual di atas. Pemilihan keempat variabel ini berdasar pada hipotesis awal bahwa masing-masing variabel memengaruhi tingkat kerukunan umat beragama di Kota Kediri. Pengukuran keempat variabel

ini akan dilakukan pada tingkat atau level *persepsi*, *sikap*, dan *tindakan* sehingga diperoleh data yang komprehensif. *Persepsi* mengacu pada pengetahuan atau pemahaman; *sikap* pada kesiapan atau kecenderungan untuk bertindak; sementara *tindakan* lebih pada sesuatu yang sudah atau sedang dilakukan atau bisa juga disebut pengalaman.

## **B. Pengumpulan Data**

### **B. 1. Survei**

Penelitian dilakukan di Kota Kediri yang meliputi tiga kecamatan: Kecamatan Kota (17 Kelurahan), Kecamatan Pesantren (15 Kelurahan), dan Kecamatan Mojoroto (14 Kelurahan). Sampel dipilih dengan teknik *multistage random sampling*. Penarikan sampel diawal di tingkat kecamatan, dari masing-masing kecamatan akan dipilih dua kelurahan secara acak. Tahap selanjutnya adalah memilih dua RW dari setiap dua kelurahan terpilih. Berikutnya, dari dua RW yang diperoleh, dipilih 20 keluarga. Dengan menggunakan Rumus Slovin, jumlah responden dalam penelitian minimal 400 org, akan tetapi untuk meningkat akurasi data jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 600 orang. Responden dipilih secara acak pada tiga level sebaran berikut dengan mempertimbangkan tingkat keragaman responden di masing-masing wilayah sebaran angket yang ditentukan: **Level 1:** Kecamatan Kota, Pesantren, dan Mojoroto (3 × @ 20 angket = 60 angket); **Level 2:** Dua kelurahan dari tiap-tiap kecamatan: Ngronggo, Jagalan dan Semampir (Kota);



Banaran, Burengan dan Betet (Pesantren); Bandar Lor, Sukorame dan Mrican (Mojoaroto) (9x @ 20 angket = 180 angket); **Level 3:** Dua RW dari tiap-tiap kelurahan terpilih (18 x @ 20 angket = 360 angket). Dengan demikian, total jumlah angket yang disebar dalam penelitian ini adalah 600 angket. Penyebaran angket dibantu oleh delapan relawan yang memiliki keahlian dan pemahaman mengenai wilayah yang menjadi sebaran angket. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin di bawah ini:

Rumus Slovin: 
$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = galat pendugaan

Dengan jumlah populasi Kota Kediri sebesar 285.582<sup>39</sup>, dan galat pendugaan sebesar 0,005% (tingkat kepercayaan 95%), diperoleh penghitungan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Populasi Kota Kediri Tahun berdasar Sensus BPS Tahun 2018, lihat *Kediri dalam Angka*, 2019.

Rumus Slovin	Ket
$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$	N = Ukuran populasi n = Ukuran sampel d = Galat pendugaan
$n = \frac{285580}{(285580 \times (0,05^2) + 1}$ n = 399,4405 (400 org)	Jadi, banyaknya sampel yang diambil dalam penelitian adalah minimal 400 org.

Dengan demikian, jumlah responden dalam penelitian ini minimal 400 org. Berdasar prinsip multistage (berjenjang), responden dipilih secara acak pada tiga level sebaran berikut dengan mempertimbangkan tingkat keragaman responden di masing-masing wilayah sebaran angket yang ditentukan:

Kec Kota @ 20 angket	Ngronggo @20 angket	RW @ 20 angket RW @ 20 angket
	Jagalan @20 angket	RW @ 20 angket RW @ 20 angket
	Semampir @20 angket	RW @ 20 angket RW @ 20 angket
Kec. Pesantren @20 angket	Banaran @20 angket	RW @ 20 angket RW @ 20 angket
	Burengan @20 angket	RW @ 20 angket RW @ 20 angket
	Betet @20 angket	RW @ 20 angket RW @ 20 angket
Kec. Mojoroto @ 20 angket	Bandar Lor @20 angket	RW @ 20 angket RW @ 20 angket
	Sukorame @20 angket	RW @ 20 angket RW @ 20 angket
	Mrican @20 angket	RW @ 20 angket RW @ 20 angket
lml= 60 angket	lml = 180 angket	lml = 360 angket
Total Jumlah Angket = 600 angket		

Dengan demikian, total jumlah angket yang disebarakan dalam penelitian ini adalah 600 angket. Penyebaran angket dibantu oleh delapan relawan yang memiliki keahlian dan pemahaman mengenai wilayah yang menjadi sebaran angket.

Indikator berupa item-item pertanyaan dalam bentuk angket atau kuesioner akan disusun untuk menjelaskan empat variabel yang menjadi fokus penelitian ini: “toleransi”, “kesetaraan” “kerjasama”, dan “kebijakan”. Indikator dalam kuesioner diberi bobot, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dalam kuesioner, para responden diminta untuk memilih salah satu dari 5 jawaban, yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Jawaban tersebut diberi skor, yakni 5 untuk SS, 4 untuk S, 3 untuk N, 2 untuk TS, dan 1 untuk STS. Pembobotan jawaban didasarkan pada skala Likert.

### **C. Pengolahan dan Analisis Data**

Data kuantitatif diolah dan dianalisis dengan menggunakan program statistik SPSS. Skor dari jawaban-jawaban responden dalam kuesioner pertama-tama diolah yang hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dengan analisis data kuantitatif ini juga diperoleh nilai skor rata-rata berupa mean dan median dari setiap variabel. Indeks skor dari beberapa variabel digabung menjadi variabel komposit. Skor variabel komposit inilah yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kerukunan umat beragama di Kota Kediri. Rumus yang dipakai untuk menghitung indeks adalah sebagai berikut:

a. Menghitung indeks

$$\text{Indeks} = \frac{(\sum \text{Frekuensi} \times \text{Skor})}{\sum \text{Frekuensi}}$$

b. Menghitung jarak interval

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{(\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah})}{5} \\ &= \frac{(5-4)}{5} \\ &= 0,8 \end{aligned}$$

Setiap skor indeks yang diperoleh kemudian diberi kategori sebagai berikut:

Skor	Ket.
1-1.70	Sangat Rendah
1.80-2.50	Rendah
2.60-3.30	Cukup
3.40-4.10	Tinggi
4.20-5.00	Sangat Tinggi

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptis terhadap hasil penghitungan tersebut dengan menginterpretasikan nilai indeks.

# **BAB IV**

## **LANSKAP KEBERAGAMAN AGAMA DI KOTA KEDIRI**

### **A. Diskripsi Singkat**

Kota Kediri berawal dari Kediri sebagai permukiman perkotaan. Dimulai ketika Airlangga memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Kahuripan ke Dahanapura, menurut Serat Calon Arang. Dahanapura (Kota Api) selanjutnya lebih dikenal sebagai Daha. Sepeninggal Airlangga, wilayah Medang dibagi menjadi dua; Panjalu di barat dan Janggala di timur. Daha menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu dan Kahuripan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Jenggala. Panjalu oleh penulis-penulis periode belakangan juga disebut sebagai Kerajaan Kadiri/Kediri, dengan wilayah kira-kira Kabupaten Kediri sampai Kabupaten Madiun sekarang.

Semenjak Kerajaan Tumapel (Singasari) menguat, ibukota Daha diserang dan kota ini menjadi kedudukan raja vazal, yang terus berlanjut hingga Majapahit, Demak, dan Mataram. Pasukan VOC menyerbu Kediri - ketika itu

dijadikan ibukota oleh Trunajaya - di tahun 1678 dalam Perang Trunajaya. Kediri jatuh ke tangan VOC sebagai konsekuensi Geger Pecinan. Jawa Timur pada saat itu dikuasai Cakraningrat IV, adipati Madura yang memihak VOC dan menginginkan bebasnya Madura dari Kasunanan Kartasura. Karena Cakraningrat IV keinginannya ditolak oleh VOC, ia memberontak. Pemberontakannya ini dikalahkan VOC, dibantu Pakubuwana II, sunan Kartasura. Sebagai pembayaran, Kediri menjadi bagian yang dikuasai VOC. Kekuasaan Belanda atas Kediri terus berlangsung sampai Perang Kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan Kota Kediri menjadi swapraja dimulai ketika diresmikannya *Gemeente* Kediri pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan *Staasblad* (Lembaran Negara) no. 148 tertanggal 1 Maret 1906. *Gemeente* ini menjadi tempat kedudukan Residen Kediri dengan sifat pemerintahan otonom terbatas dan mempunyai *Gemeente Raad* (Dewan Kota/DPRD) sebanyak 13 orang, yang terdiri dari delapan orang golongan Eropa dan yang disamakan (*Europeanen*), empat orang Pribumi (*Inlanders*) dan satu orang Bangsa Timur Asing. Sebagai tambahan, berdasarkan *Staasblad* No. 173 tertanggal 13 Maret 1906 ditetapkan anggaran keuangan sebesar f. 15.240 dalam satu tahun. Baru sejak tanggal 1 Nopember 1928 berdasarkan Stbl No. 498 tanggal 1 Januari 1928, Kota Kediri menjadi "*Zelfstanding Gemeenteschap*" ("kota swapraja" dengan menjadi otonomi penuh).

Kediri pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 menjadi salah satu titik rute gerilya Panglima Besar Jendral Sudirman. Kediri juga mencatat sejarah yang kelam juga ketika era Pemberontakan G30S PKI karena banyak penduduk Kediri yang ikut menjadi korbannya. Kota Kediri berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek, yaitu pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga. Pusat perbelanjaan dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern sudah beroperasi di kota ini.

Industri rokok Gudang Garam yang berada di kota ini, menjadi penopang mayoritas perekonomian warga Kediri, yang sekaligus merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Sekitar 16.000 warga Kediri menggantungkan hidupnya kepada perusahaan ini. Gudang Garam menyumbangkan pajak dan cukai yang relatif besar kepada pemerintah kota.

Di bidang pariwisata, kota ini mempunyai beragam tempat wisata, seperti Kolam Renang Pagora, Water Park Tirtayasa, Dermaga Jayabaya, Goa Selomangleng, dan Taman Sekartaji. Di area sepanjang Jalan Dhoho menjadi pusat pertokoan terpadat di Kediri. Beberapa sudut kota juga terdapat minimarket, cafe, resort, hiburan malam dan banyak tempat lain yang menjadi penopang ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Kota Kediri menerima penghargaan sebagai kota yang paling kondusif untuk berinvestasi dari sebuah ajang yang berkaitan dengan

pelayanan masyarakat dan kualitas otonomi. Kediri menjadi rujukan para investor yang ingin menanamkan modalnya di kota ini. Beberapa perguruan tinggi swasta, pondok pesantren, dan lain sebagainya juga memberi dampak ke sektor perekonomian kota ini. Pondok pesantren besar yang ada di Kota Kediri di antaranya adalah Pondok Pesantren Lirboyo dan Pondok Pesantren Wali Barokah.

Di bidang pendidikan, kota ini memiliki puluhan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, baik negeri maupun swasta. Ada tiga sekolah yang kemudian masuk kedalam segitiga emas pendidikan Kota Kediri (sekolah bergengsi), yaitu SMA Negeri 2 Kediri, SMA Negeri 1 Kediri dan SMA Negeri 7 Kediri. Kemudian diikuti oleh Sekolah Menengah Atas lainnya, seperti SMA Negeri 3 Kediri, SMA Negeri 8 Kediri, SMA Negeri 6 Kediri. Demikian juga Sekolah Menengah Atas swasta seperti SMA Katolik Santo Augustinus Kediri, SMA Kristen Petra Kediri. Juga beberapa Perguruan Tinggi seperti; Universitas Islam Kadiri (UNISKA), Universitas Nusantara PGRI (UNP), Universitas Pawiyatan Daha, Universitas Kadiri, Institut Agama Islam Tribhakti, Intitut Ilmu Kesehatan, Politeknik Negeri Kediri, Universitas Brawijaya Kampus Kediri, dan STAIN Kediri yang sekarang sudah bertransformasi ke IAIN Kediri,

Sejarah tersebut sangat mempengaruhi pola kehidupan beragama di kota kediri pada saat ini. Berdasarkan sensus penduduk Kota Kediri, mayoritas penduduk beragama



Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Banyak tempat ibadah seperti masjid, klenteng, pura, gereja dan lainnya telah berdiri ratusan tahun, seperti bangunan Gereja GPIB Kediri peninggalan masa kolonial Belanda dan Klenteng Tjio Hwie Kiong. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kediri terjalin dengan baik.

Dengan banyak berbagai unsur kebudayaan yang lahir, mulai dari suku, ras, adat istiadat, golongan, hingga agama. Keberagaman di Kota Kediri ini bisa hidup berdampingan karena timbul sikap toleransi. Di Kediri, semua agama dari mayoritas hingga minoritas tumbuh, bahkan dari satu agama yang memiliki berbagai aliran. Kediri adalah tempat paling damai dari sekian kota yang ada di Indonesia. Tidak ada konflik yang timbul hingga berkembang besar, seperti yang terjadi di Aceh dan Tolikara, yang mengakibatkan pengeboman masjid dan gereja.

Dengan adanya toleransi yang besar di Kediri, kerjasama antara Islam dan non Muslim berjalan baik. Dari segi budaya, terlihat masjid, gereja dan klenteng dibangun bahkan saling berdekatan, seperti yang terlihat disekitar jalan Dhoho. Namun mereka tetap saling menghormati. Dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi dirasakan dalam setiap perayaan hari raya agama, mereka bergantian saling berkunjung ke tetangga yang merayakannya untuk menyambung silaturahmi, walaupun berbeda keyakinan. Kerukunan bisa terjadi apabila setiap umat beragama

memiliki makna saling menghormati dan mengakui keberadaan hakikat dan martabat pemeluk agama, serta penganut kepercayaan terhadap Tuhannya.<sup>40</sup>

Semua itu dapat terbangun dengan harmonis, salah satunya dikarenakan tokoh masing-masing agama saling berkomunikasi dan bersilaturahmi ke tempat-tempat ibadah, melalui Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penganut Kepercayaan (PAUB-PK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Paguyuban Lintas Masyarakat (PaLM). Dalam membangun kerukunan kehidupan beragama di Kota Kediri, Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penganut Kepercayaan (PAUB-PK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama pemerintah, swasta, TNI, dan POLRI, sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang tempatnya berpindah-pindah dan bergantian sesuai musyawarah.

Pada acara dan kegiatan-kegiatan tersebut, disamping tokoh-tokoh agama, pemerintah, swasta TNI dan POLRI, yang hadir, dalam undangan tersebut juga melibatkan lembaga-lembaga seperti, Ormas, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, perbankan dan lembaga-lembaga lainnya, bahkan lembaga-lembaga ditingkat desa sampai RT. Semisal acara sarasehan yang diadakan di Kelenteng Tjoe Hwie Kiong Kota Kediri pada hari Jumat, 27 Oktober 2107 malam. Hal itu sengaja dipilih selaras dengan momentum peringatan Sumpah Pemuda dengan Tema "Harmonisasi dalam

---

<sup>40</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Kediri](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kediri)

Kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara”, yang dihadiri dari berbagai kalangan masyarakat dan mahasiswa, usai acara ada acara ramah tamah yang membuat suasana penuh keakraban dan persaudaraan tampak begitu kental di antara para tokoh agama dan seluruh tamu undangan di ruang aula Acara itu merupakan rangkaian kegiatan rutin yang digelar oleh Paguyuan Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (PAUB-PK), bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kediri.

Begitu juga acara sarsehan yang dilakukan di ruang Jayabaya Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri yang bertemakan “Merajut Persaudaraan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Kediri”. Hadir Perwakilan ketua RT dan RW se Kota Kediri, pengurus Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penganut Kepercayaan (PAUB-PK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kediri. Acara tersebut dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama, khususnya PAUB-PK, FKUB, dan RT-RW se Kota Kediri untuk menghentikan segala bentuk konflik, membatasi ruang gerak paham yang menyimpang, juga melalui sinergi ini, dapat mengantisipasi dini hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>41</sup> Menurut H. Mochammad Salim, ketua PKUB-PK, kondisi kerukunan umat beragama di Kota

---

<sup>41</sup> <http://www.adakitaneews.com>, sarsehan kerukunan antar umat beragama tanggal 19 April 2016 dibalai kota Kediri.

Kediri saat ini terbangun semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.<sup>42</sup>

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kota Kediri adalah kota yang indah, dimana Bhinneka Tunggal Ika benar-benar terwujud dalam bentuk kerukunan antar umat beragama warganya. Suasana guyub, rukun, harmonis, saling menghormati, dan toleransi beragama dari seluruh elemen masyarakat. Inilah yang menjadi dambaan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari keagamaan, kemasyarakatan, sosial, budaya, perekonomian dan pembangunan yang berjalan dengan baik.

## **B. Kehidupan Agama di Kota Kediri**

Di Kota Kediri terdapat agama dan aliran penghayat kepercayaan yang sudah lama tumbuh dan berkembang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Dari keenam agama yang diakui pemerintah; Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu, semuanya ada dan hidup berdampingan di Kota Kediri. Begitu juga dengan ragam aliran kepercayaan atau pengahayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga berkembang di daerah yang mendapatkan julukan sebagai Kota Tahu ini. Salah satu indikator berkembangnya agama-agama tersebut dapat dilacak melalui bangunan-bangunan atau situs-situs sejarah atau tempat-tempat suci peribadatan dari masing-masing agama dan penghayat kepercayaan yang tersebar di wilayah Kota Kediri.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan H. Moh. Salim, Kediri, tanggal 28 Agustus 2018.

Berikut akan kami paparkan secara singkat sejarah awal dan perkembangan masing-masing agama dan penghayat kepercayaan, beserta kegiatan-kegiatan peribadatan yang sering dilakukan pada waktu-waktu tertentu, namun secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Dari unsur agama Islam, kami akan memotret secara sekilas kehidupan keagamaan pondok pesantren Lirboyo, Jama'ah sholawat Wahidiyah di Kedunglo Bandarlor dan Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) yang berada di Kelurahan Burengan Kota Kediri. Demikian juga untuk umat agama lain, seperti Konghucu, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu serta penghayat kepercayaan, akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

## 1. Pesantren Lirboyo

Mayoritas penduduk Kota Kediri beragama Islam. Dari jumlah tersebut sebagian besar adalah *nahdliyin*, yakni berafiliasi kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Salah satu faktor penentu dari kondisi tersebut karena di Kota Kediri terdapat banyak pondok pesantren yang telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Dari pondok pesantren inilah, kultur *nahdliyin* menyebar ke masyarakat hingga berpengaruh besar di masyarakat, utamanya dalam kehidupan sosial dan budaya sehari-hari. Salah satu pesantren tua yang berpengaruh tersebut adalah Pondok Pesantren Lirboyo.

Dalam sejarahnya, Lirboyo adalah nama sebuah desa yang digunakan oleh KH. Abdul Karim menjadi nama pondok pesantren. Awal mula berdiri Pondok Pesantren Lirboyo berkaitan erat dengan kepindahan dan menetapnya KH Abdul Karim ke desa Lirboyo tahun 1910. Pondok Pesantren Lirboyo berkembang menjadi pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa kemerdekaan, Pondok Pesantren Lirboyo ikut berperan dalam pergerakan perjuangan dengan mengirimkan santri-santrinya ke medan perang seperti peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.

Sebagai pusat pendidikan Islam, Pondok Pesantren Lirboyo mencetak generasi bangsa yang cerdas ruhaniyah, juga *smart-intelektual*, mumpuni dalam keberagaman bidang, juga keberagaman Islam yang otentik. Pondok Pesantren Lirboyo memadukan antara tradisi dan kemodernan sehingga terbukti telah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang saleh keagamaan, sekaligus saleh sosial. Sistem pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Lirboyo, yang dikenal selama ini adalah sistem klasikal (*bandongan, sorogan dan wethon*). Sistem klasik diajarkan di Pondok Pesantren Lirboyo sebelum berdirinya Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien tepatnya sejak berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo. Sementara sistem klasikal dimulai sejak berdirinya Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien tahun 1925 Masehi hingga sekarang.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ato'ilah Anwar, Kediri, 15 Agustus 2018.

Dua tahun setelah Indonesia Merdeka, tepatnya tahun 1947, Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien mengalami pembaharuan dengan disusunnya tingkat jenjang pendidikan, yaitu *Ibtidaiyyah* dan *Tsanawiyah*. Adapun kurikulumnya masih menggunakan kurikulum lama. Pada tahun 1947, didirikan lembaga baru yang berupa Madrasah Mualimin atas gagasan KH. Zamroji yang waktu itu menjadi pengajar/*mustahiq* tingkat *tsanawiyah*.<sup>44</sup> Pada tahun ajaran 1977-1978, Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien menyediakan tingkat aliyah. Keputusan ini disepakati dalam sidang panitia kecil Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, yang pada masa itu dipimpin oleh Bapak Ilham Nadzir. Dengan terbentuknya pendidikan tingkat aliyah ini, menandai masa peralihan dari sistem pendidikan model lama menuju sistem modern yang diselaraskan dengan tradisi pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo. Pada tahun ini pula jenjang pendidikan disempurnakan untuk *Ibtidaiyyah* 6 Tahun, *Tsanawiyah* 3 Tahun dan *Aliyah* 3 tahun.<sup>45</sup>

Adapun visi pondok pesantren Lirboyo yang ingin dicapai adalah membangun santri yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah dan disiplin. Visi tersebut dapat dicapai dengan cara mencetak muslim intelektual yang beriman, bertaqwa dan berakhlaqul karimah serta menciptakan kader ulama yang mampu mentransformasikan ilmu agama dalam berbagai kondisi.

---

<sup>44</sup> [www.lirboyo.co.id](http://www.lirboyo.co.id)

<sup>45</sup> *Ibid.*

## 2. Pondok Pesantren Kedunglo

Pondok Pesantren Kedunglo terletak di pinggir Sungai Brantas Kediri, diantara dua jembatan lama dan jembatan baru Kota Kediri. Letak persisnya berada di Desa Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Ponpes Kedunglo didirikan oleh KH. Mohammad Ma'roef pada awal abad 20 atau sekitar tahun 1900an.

Sejak berabad-abad lalu, pondok pesantren telah mewarnai perjalanan sejarah nusantara, khususnya di bidang pendidikan. Pada masa awal perkembangan Islam di tanah Jawa, para ustadz dan mubaligh mendidik kader-kader pejuang Islam di pesantren. Fungsi ini bertambah luas ketika Sunan Ampel yang membuka pondok pesantren di Surabaya mengajarkan pula berbagai disiplin ilmu dan tidak terbatas pada ilmu agama. Mulanya pesantren memang terkesan sangat mengisolasi diri terhadap ilmu pengetahuan modern, utamanya yang berasal dari barat.

Akan tetapi, memasuki pertengahan tahun 1900-an, beberapa pondok pesantren mulai mau menerapkan ilmu modern. Tidak hanya itu, sistem pendidikannya pun ikut juga mengadopsi sistem pendidikan nasional. Salah satunya yang dilaksanakan oleh Ponpes Kedunglo, Kediri, Jawa Timur. Pondok pesantren yang kuat aroma tasawuf-nya ini didirikan tahun 1901 oleh KH. Muhammad Ma'roef.<sup>46</sup>

KH. Muhammad Ma'roef ini menempuh pendidikan di Ponpes Bangkalan Madura pimpinan KH M Cholil.

---

<sup>46</sup> [www.wahidiyahkediri.org.id](http://www.wahidiyahkediri.org.id).



Seperti ponpes yang lain, Kedunglo membawa misi untuk mengajak masyarakat mengamalkan ajaran agama Islam. KH Ma'roef, RA wafat tahun 1955 dan kepemimpinan pesantren dilanjutkan salah satu anaknya, KH Abdul Madjid. Kedunglo yang terletak di desa Bandarlor, Kediri, mempunyai luas sekitar 2 hektar. Lokasinya tampak berbaur dengan pemukiman penduduk, dalam artian ponpes ini tidak 'memagari' diri pada satu kompleks. Kegiatan belajar mengajar dilangsungkan di beberapa gedung bertingkat dan terdiri dari gedung local lama 2 tingkat (10 lokal) gedung baru 4 tingkat (16 lokal) dan Gedung TK Plus Wahidiyah (2 tingkat). Gedung pendidikan tersebut akan ditambah dengan Gedung Universitas Wahidiyah yang akan dibangun tahun depan.

Untuk menampung para santri, tengah dibangun asrama santri yang saat ini masih dalam tahap pematangan konsep. Jumlah santrinya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan kini tercatat 1.000 santri (60 persen santri putri dan 40 persen putra) menimba ilmu dan mondok di Ponpes Kedunglo. Mereka bukan hanya berasal dari Kediri dan sekitarnya, melainkan juga dari seluruh Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera termasuk dari Daerah Istimewa Nangro Aceh Darus Salam.

### 3. Ormas LDII

Pondok Pesantren Walibarokah, Burengan Banjarn, Kediri dibawah naungan Yayasan Wali Barokah didirikan atas gagasan KH. Nurhasan Al-Ubaidah bin KH Abdul Aziz. Secara historis pendirian Yayasan Wali Barokah ini diawali pada tahun 1950, saat KH. Nurhasan Al Ubaidah bertabligh ke wilayah Kota Kediri atas permintaan Mbah Damah dan atas saran dari H. Harun (putra ke-3 dari Mbah Dammah sekaligus teman KH. Nurhasan Al Ubaidah saat belajar bersama ilmu agama Islam di Arab Saudi selama 10 tahun). Sebelumnya Mbah Dammah telah meminta kepada H. Harun untuk kembali pulang ke Kota Kediri dan melakukan dakwah untuk keluarga besar Mbah Dammah, akan tetapi ditolak secara halus oleh H. Harun dengan mengajukan teman belajarnya waktu di Arab Saudi untuk melakukan dakwah, yaitu: KH. Nurhasan Al Ubaidah. Kemudian dakwahnya dilakukan di sebuah surau milik Mbah Damah yang pada waktu itu dikenal sebagai orang kaya di Desa Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Pada waktu itu diadakan pengajian Al Qur'an yang diikuti 25 (dua puluh lima) orang.<sup>47</sup>

Berkat kesabaran dan kegigihannya, lambat laun dia membeli sebuah rumah di jalan Kenari No. 9 (sekarang dikenal sebagai Jalan Letjend. Suprpto gang I/21 Kediri) yang lokasinya berdekatan dengan surau Mbah Damah, yang telah diwaqafkan oleh Mbah Dammah dan menjadi

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Usman Arif, Kediri, 5 Agustus 2018.

masjid utama di lingkungan Ponpes Wali Barokah Kediri dan kemudian menjadi cikal bakal Pondok Pesantren di Desa Burengan/Banjaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan akhirnya menjadi Pondok Pesantren besar bernama Pondok Pesantren Wali Barokah Burengan-Banjaran Kediri.

Di samping para santri menerima pelajaran ilmu-ilmu agama, mereka juga diberi bekal ketrampilan sesuai dengan bakatnya seperti kerampilan menjahit/ bordir, pertukangan batu/ kayu, elektronik, perbengkelan, pertanian, dan sebagainya. Diharapkan setelah mereka lulus dari pondok, tidak akan menggantungkan diri pada keluarga dan orang tua, tetapi dapat hidup mandiri.

Sistem pengajaran di Pondok Pesantren Walibarokah Burengan Banjaran Kediri tidak didasarkan atas penjejangan yang ketat sebagaimana sekolah formal, misalnya dalam hal penerimaan santri. Setiap bulan Pondok Pesantren Walibarokah Burengan Banjaran Kediri dapat menerima santri baru, atau bahkan setiap hari. Sebaliknya, setiap saat Pondok Pesantren Walibarokah Burengan Banjaran Kediri juga meluluskan santri-santrinya, tergantung dari kesiapan para santri untuk menjalani test kelulusan, baik kelulusan masing-masing tingkat maupun kelulusan akhir. Dengan demikian, pada dasarnya sistem pembelajaran di Pondok Pesantren Walibarokah Burengan Banjaran Kediri ini, meskipun dilaksanakan secara klasikal berdasar kelompok pembelajaran tetapi sesungguhnya bersifat individual. Bagi santri yang merasa sudah mampu, dapat

sewaktu-waktu mengajukan untuk test kelulusan tingkat ataupun test kelulusan akhir.

Selanjutnya dalam melakukan dakwah dan praktik peribadatan, pihak LDII menyadari masih ditemukan pihak-pihak luar yang masih menganggapnya sebagai kelompok ekstrim. Hal itu menjadi tantangan sekaligus evaluasi tersendiri. Oleh karenanya dengan bergabung ke PAUB PK dan FKUB Kota Kediri selama ini menjadi salah satu bukti bahwa orang LDII tidak eksklusif lagi.<sup>48</sup>

#### 4. Konghucu

Kelenteng Tjoe Hwie Kiong Kediri adalah sebuah kelenteng Tri Dharma yang berada Jl. Yos Sudarso No 148, Kediri, Jawa Timur. Klenteng yang sudah terdaftar di Balai Purbakala dan Cagar Budaya (BPCB) Trowulan ini sebagai bangunan cagar budaya. Bangunan ini juga memiliki sejarah panjang dalam gerakan perlawanan terhadap penjajah Belanda.<sup>49</sup>Dinamakan Tri Darma, sebab di klenteng ini juga untuk tiga penganut aliran, yakni penganut Tao, Budha dan Konghucu. Salah satu buktinya adanya altar Tri Nabi di Klenteng Tri Darma, masing-masing berisi arca Lao Tze bagi para penganut Tao dengan lambang Yin Yang. Altar kedua berisi arca Budha Sakyamuni bagi penganut Budha dengan lambang Swastika, dan yang terakhir adalah arca Nabi Kong Hu Cu bagi penganut Konghucu dengan lambang Genta.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Prayitno, Kediri, 5 Agustus 2018

<sup>50</sup> Ibid.

Setiap tahun pihak klenteng selalu mengadakan perayaan ulang tahun klenteng maupun peringatan tahun baru imlek. Perayaan berlangsung meriah, karena ada pertunjukan barongsai dan leang leong mengelilingi Kota Kediri. Saat seperti itu juga digunakan untuk mengundang umat agama lain dan beberapa pejabat pemerintah untuk berkumpul, sambil menikmati pentas seni tradisi dan pawai budaya.

## 5. Muhammadiyah

Berdasarkan *Soeara Moehammadijah*, Muhammadiyah di Kediri telah menjadi cabang pada tahun 1933. Penyebaran pengaruh Muhammadiyah di Kediri awalnya dilakukan oleh Masruki, seorang pedagang yang berasal dari Yogyakarta. Pola penyebarannya dilakukan dengan sarana pengajian dan mengajarkan tentang pembaruan Islam yang cukup efektif pada saat itu. Luasnya wilayah Kediri merupakan suatu tantangan bagi para kader Muhammadiyah dalam melakukan dakwahnya. Untuk itu, dilakukan pengembangan kepengurusan daerah Muhammadiyah menjadi dua yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Kediri pada tahun 1990.<sup>51</sup>

Pendidikan Muhammadiyah secara kelembagaan pertama kali berdiri di Kediri adalah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Kediri, pada 18 Februari 1958.

---

<sup>51</sup> Ryandika Mega Putra, *Perkembangan Pendidikan Muhammadiyah di Kota Kediri Tahun 1933-1990*, (Malang: UNM, 2014).

Berdirinya pendidikan Muhammadiyah secara kelembagaan di Kediri menunjukkan bahwa minat para kader Muhammadiyah untuk turut mengembangkan pendidikan di Kediri sangat besar. Perkembangan mutu pendidikan Muhammadiyah tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di Kediri, sehingga menyebabkan tingkat minat siswa yang ingin ke lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah sangat besar. Dalam perkembangannya hingga sekarang, ormas ini selain bergerak dibidang pendidikan tingkat dasar hingga sekolah menengah dan kejuruan, juga telah mendirikan klinik kesehatan dan rumah sakit yang cukup besar di Kota Kediri.

## **6. Panggung *Sholawatan***

Suatu hal yang sangat fenomenal dalam kehidupan agama satu dekade belakangan ini, utamanya di kalangan umat muslim di Kota Kediri, adalah seringnya digelar acara *sholawatan*, baik yang berskala kecil hingga skala besar. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh komunitas atau organisasi yang beragam, misalnya lembaga pendidikan, ormas keagamaan, poodok pesantren maupun oleh instansi pemerintah. Masyarakat-pun terlihat antusias untuk datang dan mengikuti acara tersebut. Apalagi jika acara tersebut mengundang tokoh nasional yang sudah cukup dikenal publik.

Seperti kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang lalu, yang diadakan dalam rangka menyambut

datangnya bulan suci ramadhan. Acara ini diharapkan masyarakat Kota Kediri mendapatkan hiburan bernuansa Islami dari bintang tamu Haddad Alwi. Acara tersebut dilaksanakan di Stadion Brawijaya.<sup>52</sup>

Acara sholawatan sering digelar pada momentum-momentum tertentu, diantaranya menjelang ramadhan, pergantian tahun baru masehi maupun tahun baru hijriyah. Bahkan, pernah juga dilaksanakan acara *sholawatan* yang mengundang Habib Lutfi saat menjelang pelaksanaan pilkada 2018 yang lalu. Acara tersebut menjadaijang untuk saling silaturahmi, selain itu kegiatan tersebut adalah bagian dari budaya keagamaan yang mereka dimilikimasyarakat.

## **7. Perayaan Hari Nyepi**

Di Kota Kediri, umat Hindu meskipun tergolong minoritas, tetapi juga dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan leluasa dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Salah satunya pada tahun 2018, umat Hindu di Kota Kediri merayakan hari Raya Nyepi di bundaran Sekartaji. Dalam peringatan Hari Raya Nyepi Tahun 2018 yang bertepatan dengan tahun Baru Caka 1940, umat Hindu melakukan kegiatan ritual Tawur Agung Kesanga, Pawai Ogoh-Ogoh, Barongsai dan Jaranan. Kegiatan dipusatkan di Bundaran Sekartaji Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Tema kegiatan, yakni " Melalui Catur Brata Penyepian, Kita Tingkatkan Soliditas Sebagai Perekat

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Nur Muhyar, Kediri, 18 Agustus 2018.

Keberagamaan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI “. dengan dihadiri kurang lebih 250 orang.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Kapolsek Mojoroto; Kompol Didit Prihanto SH. MH, Kabag Ops Polresta Kediri; Kompol Sunardi, Danramil 03 Mojoroto; Kapten Czi M. Muklasin, Kabag Kesra Kota Kediri; Drs. Ardi Handoko Msi., Brigif Mek 16/WY; Lettu Ade Setyawan, Sekcam Mojoroto; Eko, Ketua PHDI Kota Kediri; Komang Kusuma Yudana.ST, FKUB Kota Kediri, Ketua Panitia Penyelenggara; Ni Made Susilowati. SH., Sekretaris Penyelenggara; I Made Dwi Purmana. Mangku Joko Winarno. Calon Walikota Kediri; Abu Bakar SE, umat Hindu se-Kota Kediri dan perwakilan dari IAIN Kota Kediri.

Dalam sambutannya, Ketua PHDI Kota Kediri (Komang Kusuma Yudana) menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI /Polri, Pemerintah Kota Kediri dan semua pihak yang telah membantu mengamankan jalannya upacara “Tawur Agung Kesanga Umat Hindu Kota Kediri”, dalam rangka Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940 atau tahun 2018 Masehi.<sup>53</sup>

## **8. Umat Kristiani dan Perayaan Natal**

Umat Kristiani di Kota Kediri jumlahnya menempati urutan kedua setelah umat muslim. Baik agama Kristen dan Katolik di Kota Kediri keberadaannya sudah sejak jaman kolonial. Hal tersebut dikarenakan keberadaan dua agama

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan KomangKusumaYuda, Kediri, 20 Agustus 2018.



tersebut dibawa oleh para misionaris yang memanfaatkan proses penjajahan saat itu. Di Kota Kediri terdapat lembaga kepastoran atau paroki. Gereja kepastoran yang terletak di jalan veteran ini juga mengelola banyak lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga menengah/kejuruan.<sup>54</sup>

Sedangkan Agama Protestan juga paling banyak memiliki gereja yang terdapat di tiga kecamatan di wilayah Kota Kediri. Selain gereja merah, terdapat gereja-gereja lain seperti GKI, GKJW dan gereja kecil lainnya. Agama Protestan juga memiliki lembaga pendidikan yang beranaung dibawah yayasan PETRA, selain memiliki rumah sakit BAPTIS yang terletak di Kecamatan Pesantren.

Dalam setiap perayaan natal yang digelar oleh umat Kristiani di Kota Kediri, pejabat pemerintah kota maupun pengurus FKUB selalu diundang. Wakil Wali Kota Kediri, Lilik Muhibbah, bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kediri.

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Agustinus Sunardi, Kediri, 08 Agustus 2018.



# BAB 5

## HASIL SURVEI DAN INDEKS KUB

### A. Karakteristik Responden

Diagram 1.1  
Sebaran Kuesioner Berdasarkan Agama

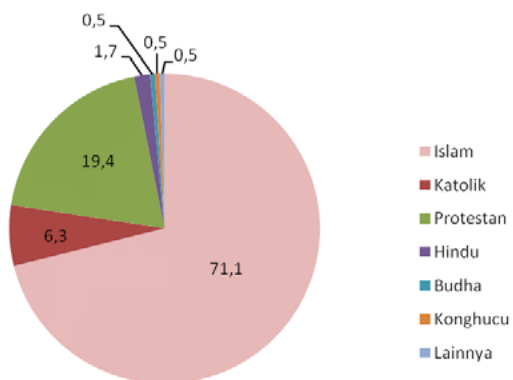


Diagram 1.2  
Sebaran Kuesioner Berdasarkan Jenis Kelamin

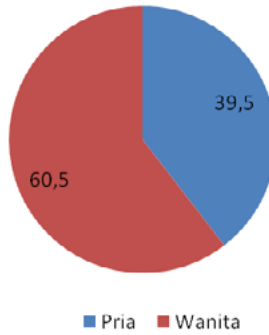


Diagram 1.3  
Sebaran Kuesioner Berdasarkan **Usia**

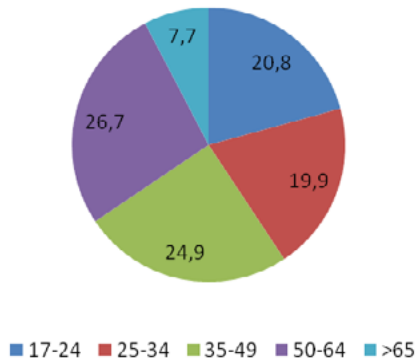
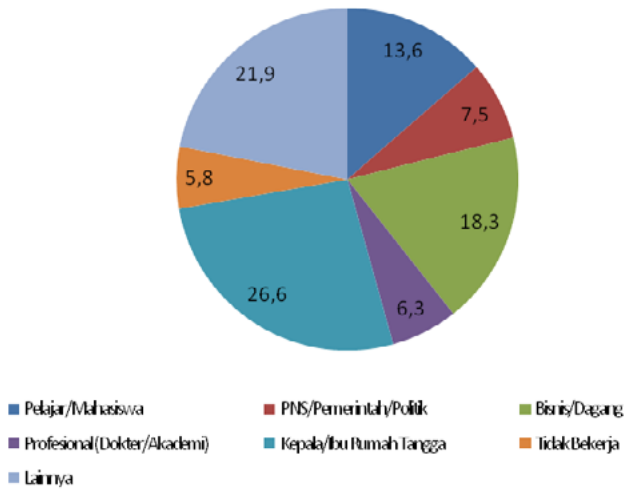
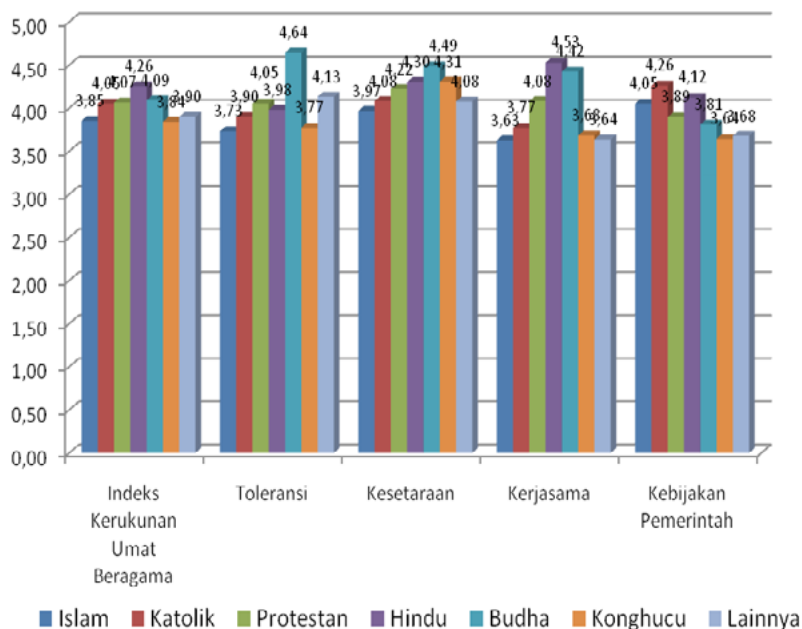


Diagram 1.4  
Sebaran Kuesioner Berdasarkan Profesi/Pekerjaan



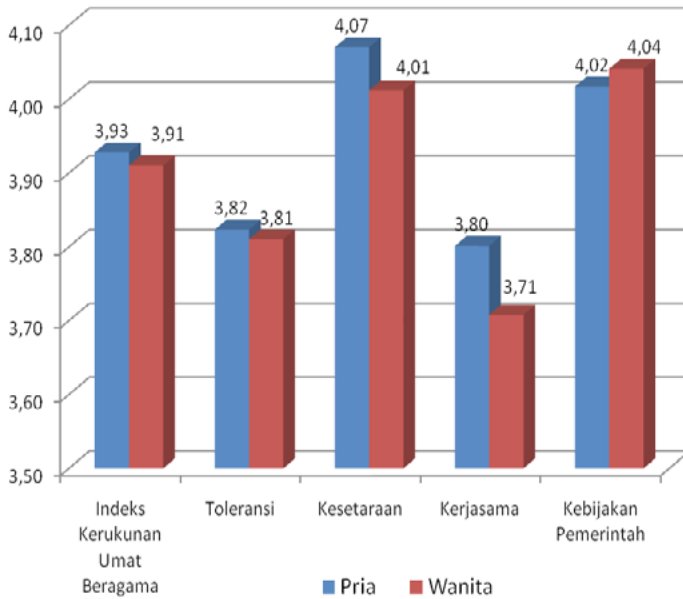
## B. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Berdasarkan Aspek dan Karakteristik Responden

Grafik 1.1  
Indeks KUB dan Aspeknya Berdasarkan Agama



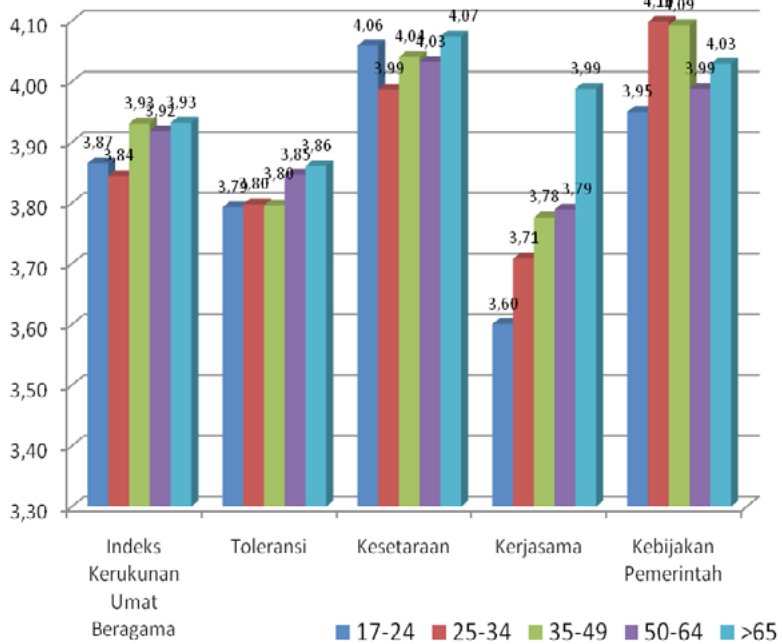
Agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama		Toleransi		Kesetaraan		Kerjasama		Kebijakan Pemerintah	
Islam	3.85	Tinggi	3.73	Tinggi	3.97	Tinggi	3.63	Tinggi	4.05	Tinggi
Katolik	4.05	Tinggi	3.90	Tinggi	4.08	Tinggi	3.77	Tinggi	4.26	Sangat Tinggi
Protestan	4.07	Tinggi	4.05	Tinggi	4.22	Sangat Tinggi	4.08	Tinggi	3.89	Tinggi
Hindu	4.26	Sangat Tinggi	3.98	Tinggi	4.30	Sangat Tinggi	4.53	Sangat Tinggi	4.12	Tinggi
Budha	4.09	Tinggi	4.64	Sangat Tinggi	4.49	Sangat Tinggi	4.42	Sangat Tinggi	3.81	Tinggi
Konghucu	3.84	Tinggi	3.77	Tinggi	4.31	Sangat Tinggi	3.68	Tinggi	3.64	Tinggi
Lainnya	3.90	Tinggi	4.13	Tinggi	4.08	Tinggi	3.64	Tinggi	3.68	Tinggi

Grafik 1.2  
Indeks KUB dan Aspeknya Berdasarkan Jenis Kelamin



Jenis Kelamin	Indeks Kerukunan Umat Beragama		Toleransi		Kesetaraan		Kerjasama		Kebijakan Pemerintah	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
Pria	3,93	Tinggi	3,82	Tinggi	4,07	Tinggi	3,80	Tinggi	4,02	Tinggi
Wanita	3,91	Tinggi	3,81	Tinggi	4,01	Tinggi	3,71	Tinggi	4,04	Tinggi

Grafik 1.3  
Indeks KUB dan Aspeknya Berdasarkan Usia

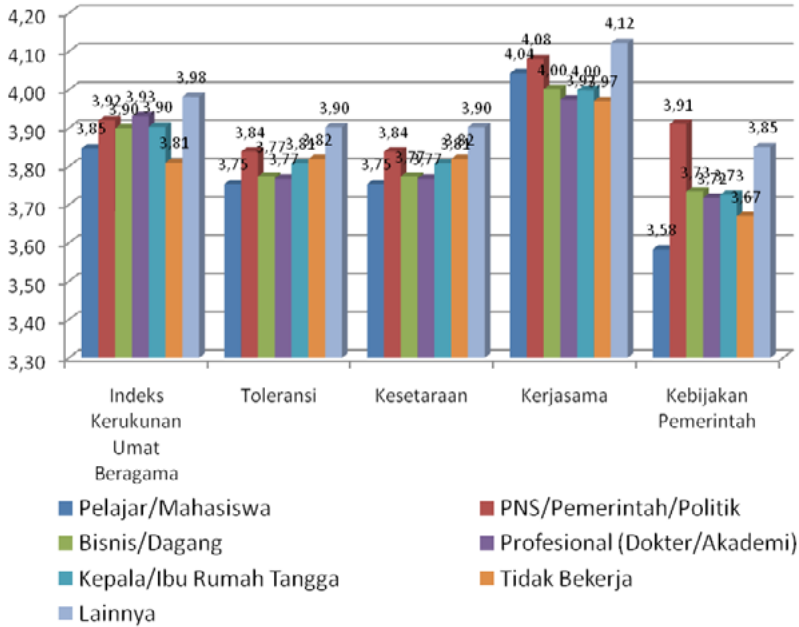


Tabel 1.1

Usia	Indeks Kerukunan Umat Beragama		Toleransi		Kesetaraan		Kerjasama		Kebijakan Pemerintah	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
17-24	3.87	Tinggi	3.79	Tinggi	4.06	Tinggi	3.60	Tinggi	3.95	Tinggi
25-34	3.84	Tinggi	3.80	Tinggi	3.99	Tinggi	3.71	Tinggi	4.10	Tinggi
35-49	3.93	Tinggi	3.80	Tinggi	4.04	Tinggi	3.78	Tinggi	4.09	Tinggi
50-64	3.92	Tinggi	3.85	Tinggi	4.03	Tinggi	3.79	Tinggi	3.99	Tinggi
>65	3.93	Tinggi	3.86	Tinggi	4.07	Tinggi	3.99	Tinggi	4.03	Tinggi



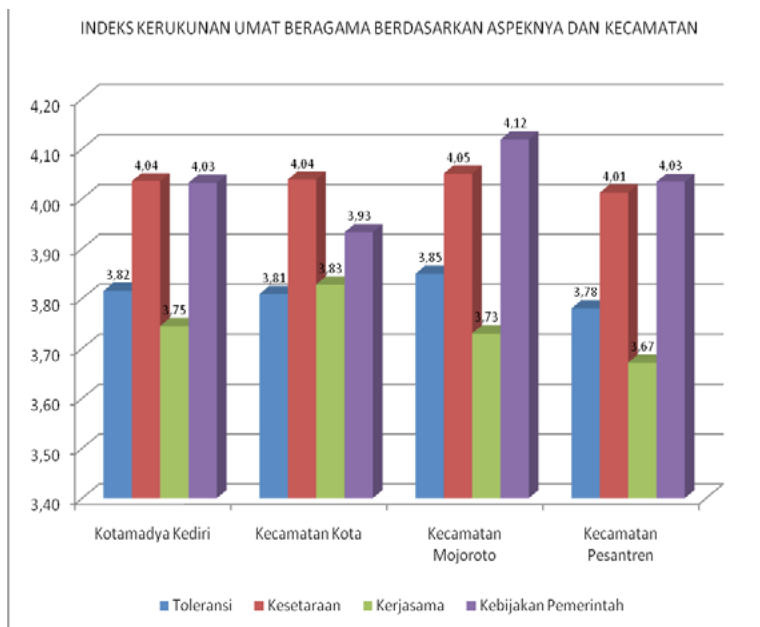
Grafik 1.4  
Indeks KUB dan Aspeknya Berdasarkan Pekerjaan



Pekerjaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama		Toleransi		Kesetaraan		Kerjasama		Kebijakan Pemerintah	
	Nilai	Tinggi	Nilai	Tinggi	Nilai	Tinggi	Nilai	Tinggi	Nilai	Tinggi
Pelajar/Mahasiswa	3.85	Tinggi	3.75	Tinggi	3.75	Tinggi	4.04	Tinggi	3.58	Tinggi
PNS/Pemerintah/Politik	3.92	Tinggi	3.84	Tinggi	3.84	Tinggi	4.08	Tinggi	3.91	Tinggi
Bisnis/Dagang	3.90	Tinggi	3.77	Tinggi	3.77	Tinggi	4.00	Tinggi	3.73	Tinggi
Profesional (Dokter/Akademi)	3.93	Tinggi	3.77	Tinggi	3.77	Tinggi	3.97	Tinggi	3.72	Tinggi
Kepala/Ibu Rumah Tangga	3.90	Tinggi	3.81	Tinggi	3.81	Tinggi	4.00	Tinggi	3.73	Tinggi
Tidak Bekerja	3.81	Tinggi	3.82	Tinggi	3.82	Tinggi	3.97	Tinggi	3.67	Tinggi
Lainnya	3.98	Tinggi	3.90	Tinggi	3.90	Tinggi	4.12	Tinggi	3.85	Tinggi

## C. Indeks KUB dan Aspeknya Berdasarkan Kecamatan

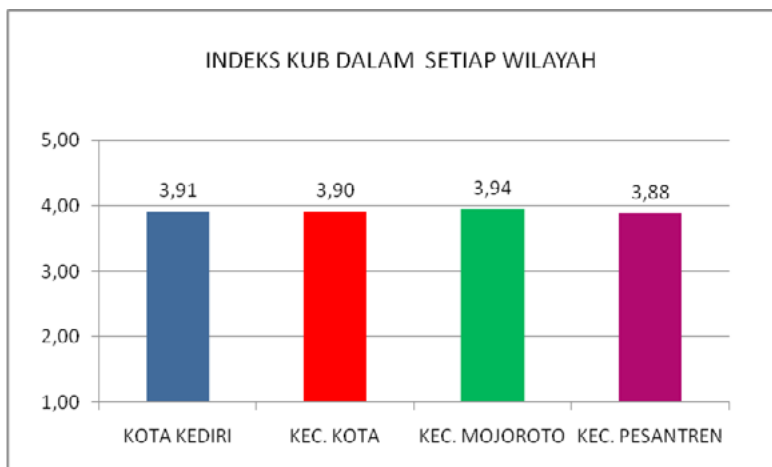
Grafik 1.5  
Indeks KUB dan Aspeknya Berdasarkan Kecamatan



Aspek Kerukunan Umat Beragama	Kota Kediri		Kecamatan Kota		Kecamatan Mojojoto		Kecamatan Pesantren	
	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
Toleransi	3.82	Tinggi	3.81	Tinggi	3.85	Tinggi	3.78	Tinggi
Kesetaraan	4.04	Tinggi	4.04	Tinggi	4.05	Tinggi	4.01	Tinggi
Kerjasama	3.75	Tinggi	3.83	Tinggi	3.73	Tinggi	3.67	Tinggi
Kebijakan Pemerintah	4.03	Tinggi	3.93	Tinggi	4.11	Tinggi	4.03	Tinggi

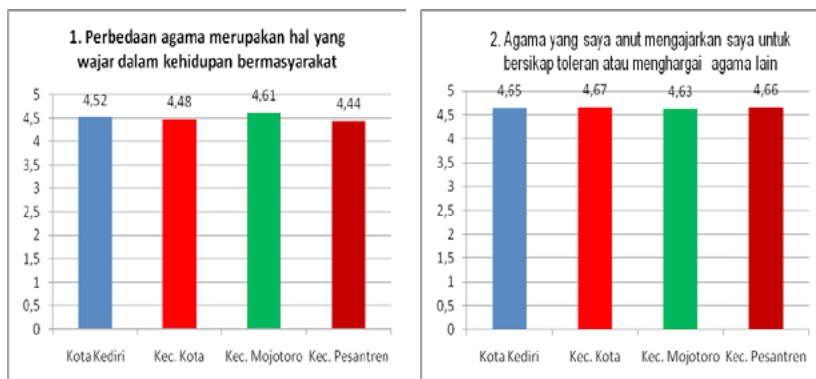
## D. Indeks KUB Kota Kediri dan Per Kecamatan

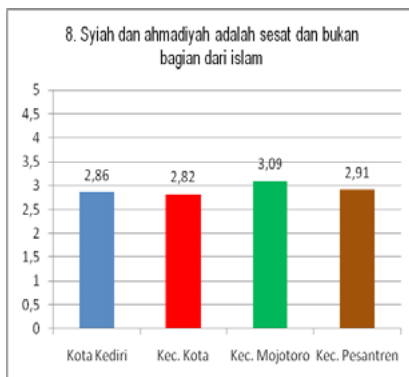
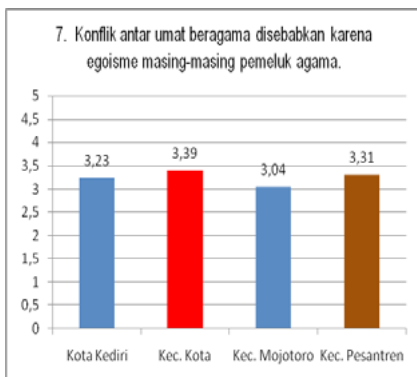
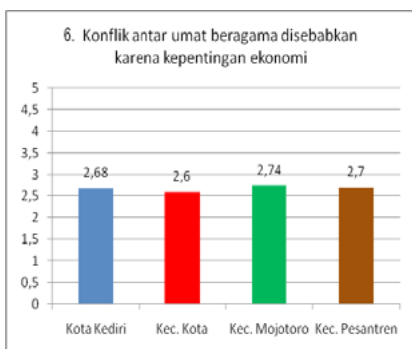
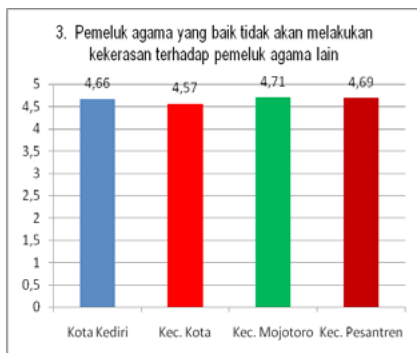
Grafik 1.6  
Indeks KUB Kota Kediri

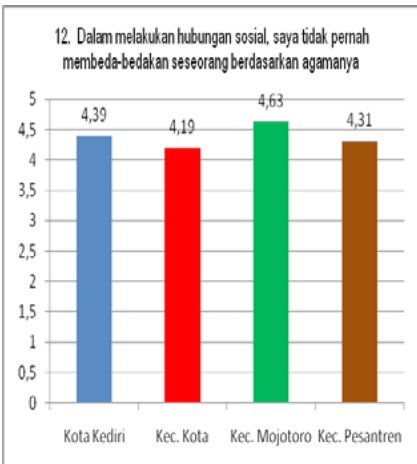
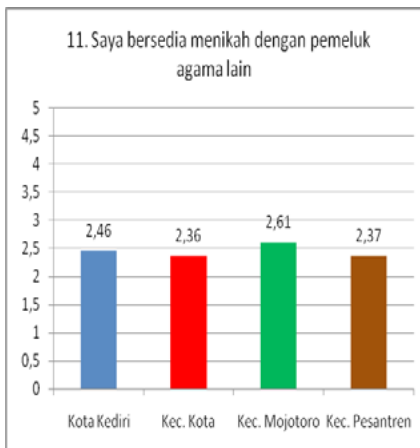


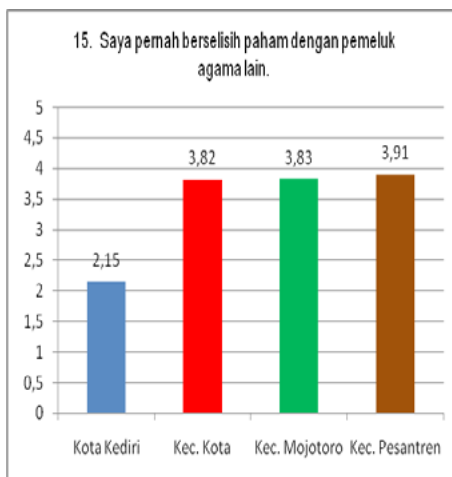
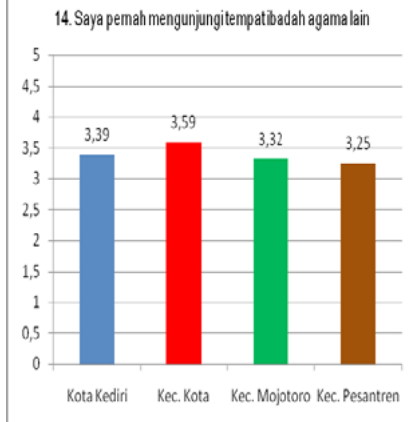
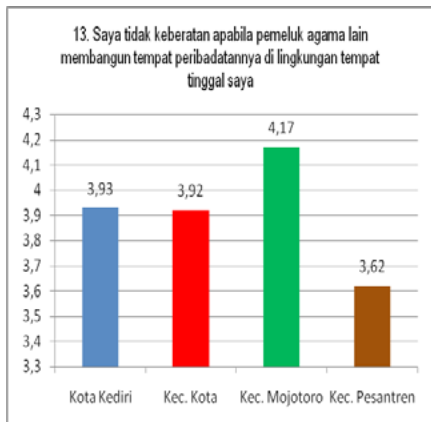
## E. Indeks KUB Berdasarkan Pertanyaan Pada Tiap Variable

Grafik 1.7  
Indeks KUB Berdasarkan Pertanyaan: Toleransi

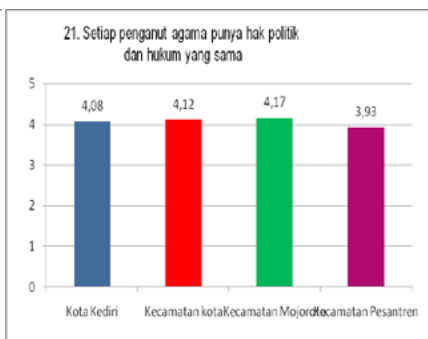
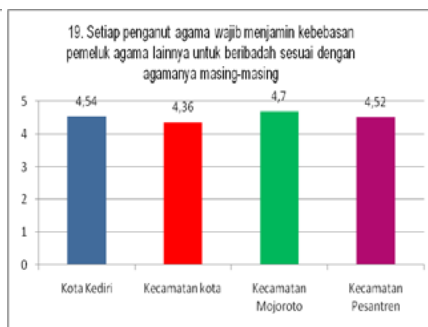
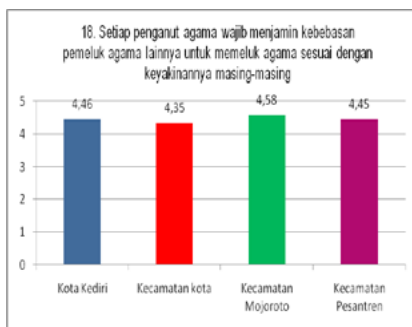
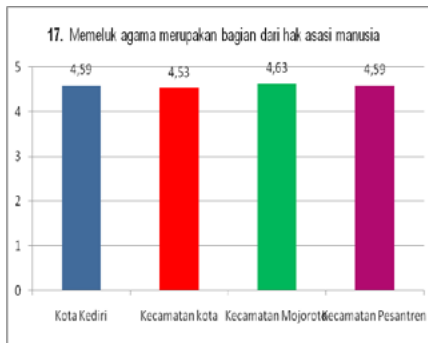
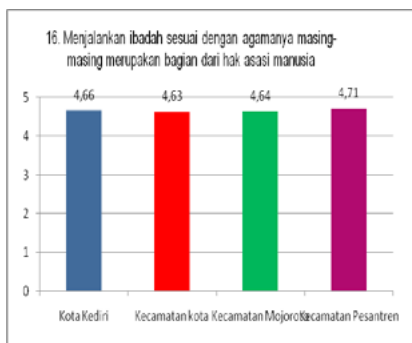


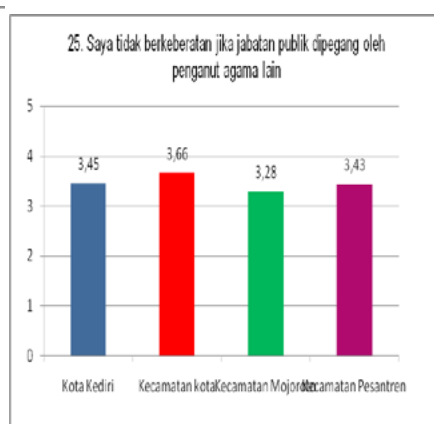
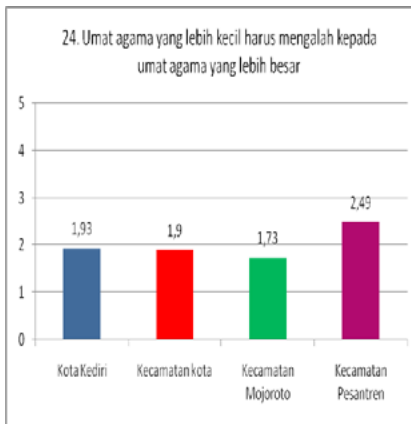
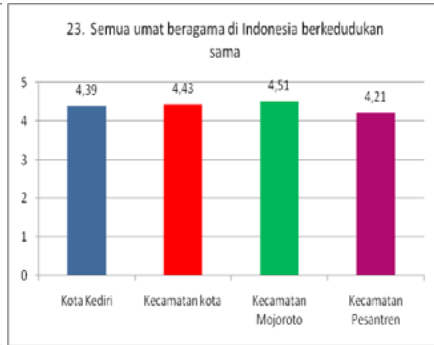






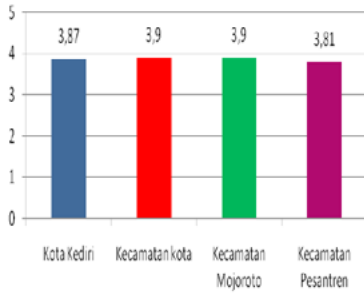
Grafik 1.8  
Indeks KUB Berdasarkan Pertanyaan: Kesetaraan



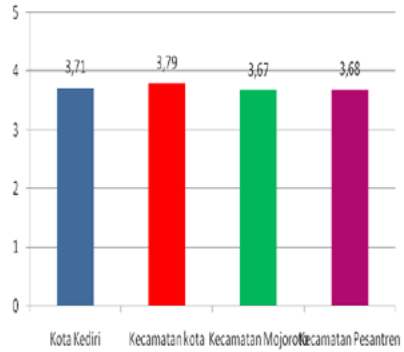




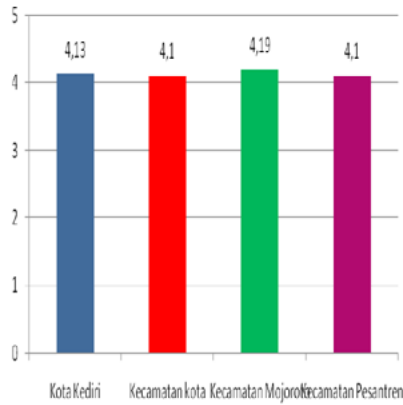
26. Saya bersedia terbuka (mengizinkan) kegiatan keagamaan lain di lingkungan saya



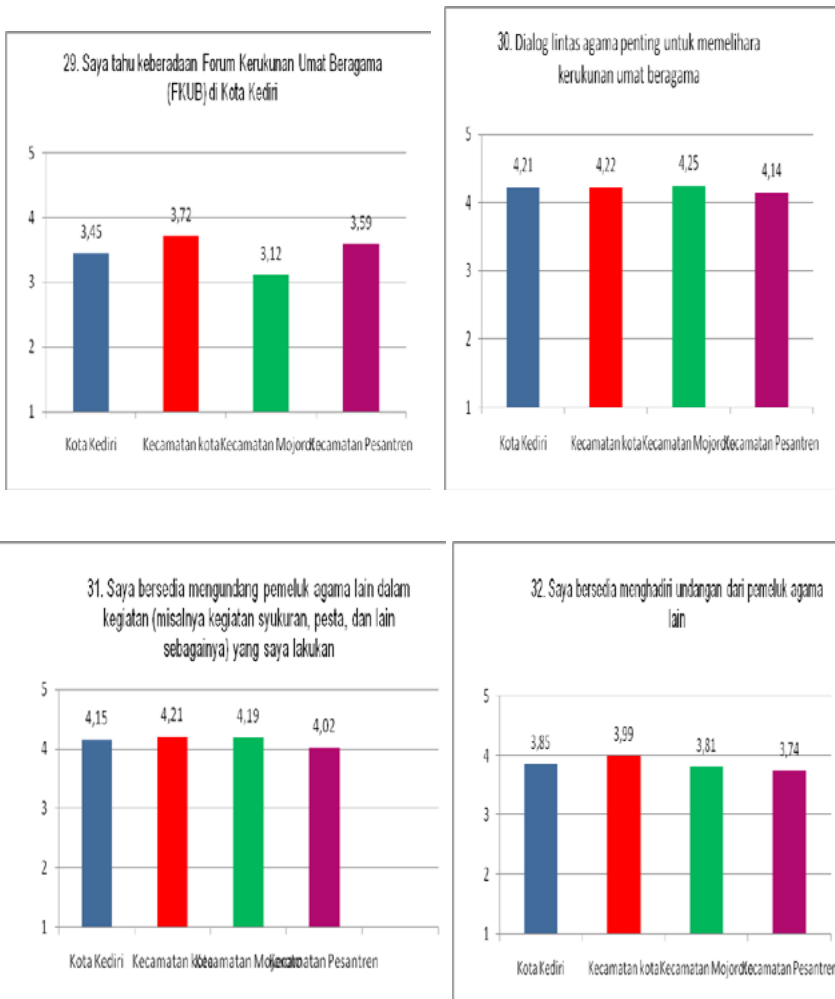
27. Saya bersedia melindungi agama lain



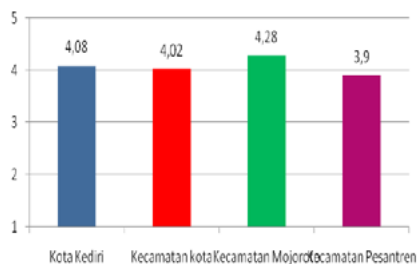
28. Saya menegur teman saya yang menghina agama lain



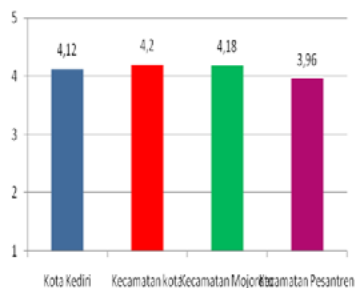
Grafik 1.9  
Indeks KUB Berdasarkan Pertanyaan: Kesetaraan



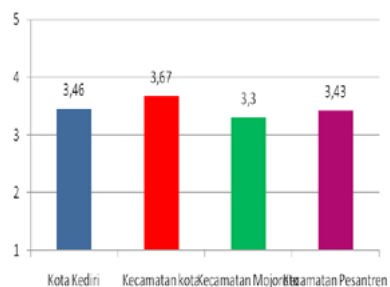
33. Saya bersedia memberikan sumbangan kepada pemeluk agama lain yang memerlukannya



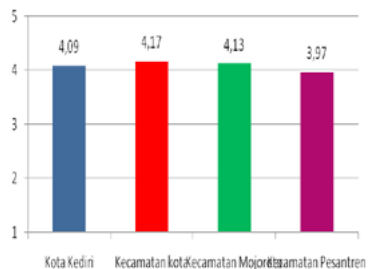
34. Saya bersedia melakukan hubungan kerja dengan pemeluk agama lain

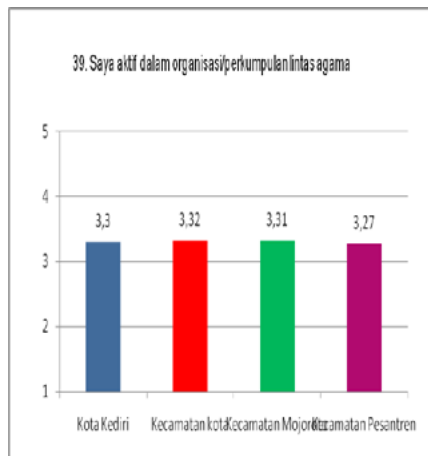
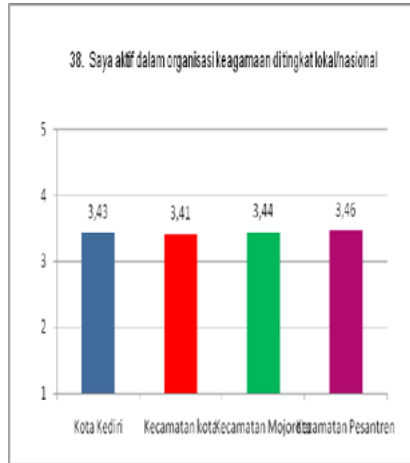
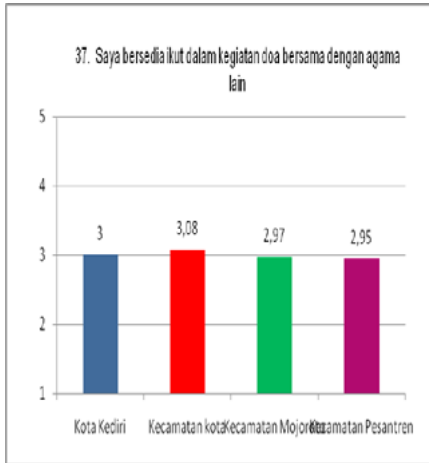


35. Saya bersedia melakukan hubungan kerja dengan pemeluk agama lain

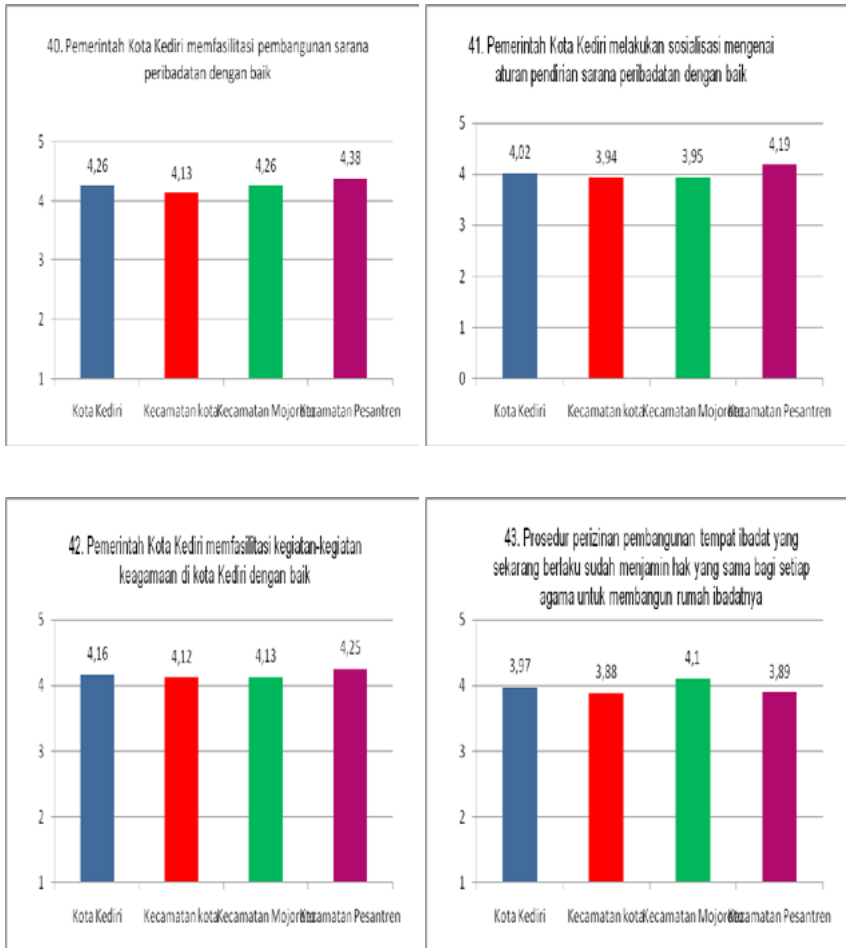


36. Saya bersedia berdialog dan musyawarah dengan orang berbeda agama

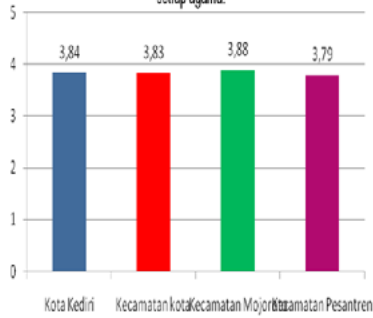




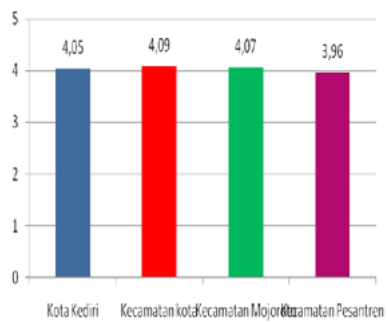
**Grafik 1.10**  
**Indeks KUB Berdasarkan Pertanyaan: Kebijakan**



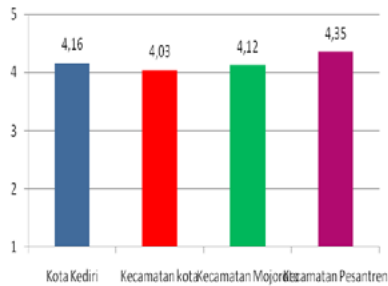
44. Prosedur peizinan pembangunan tempat ibadah yang sekarang berlaku sudah diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama.



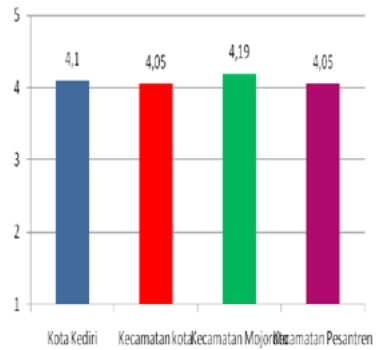
45. Pemerintah Kota Kediri memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik



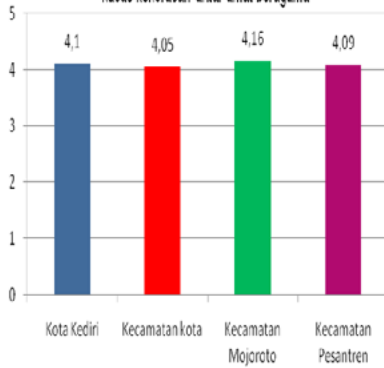
46. Pemerintah Kota Kediri sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai agama



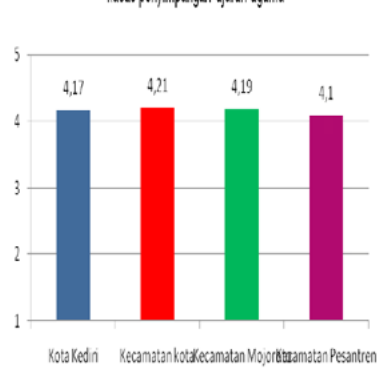
47. Pemerintah Kota Kediri bersikap tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama



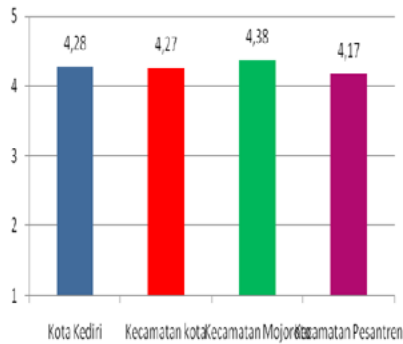
48. Pemerintah Kota Kediri bersikap tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama



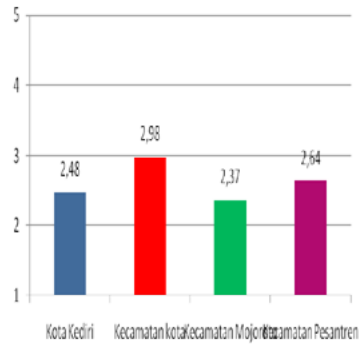
49. Pemerintah Kota Kediri bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama



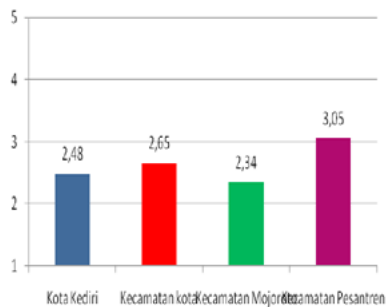
50. Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama



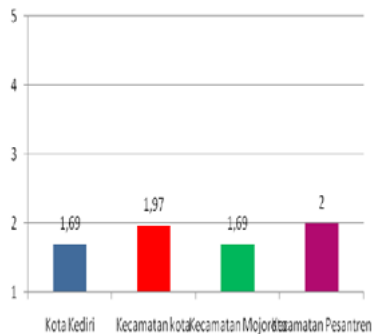
51. Banyak kebijakan Pemerintah RI saat ini tidak memihak kepada agama yang saya anut



52. Banyak kebijakan Pemerintah RI saat ini tidak memihak kepada agama yang saya anut



53. Saya ikut membagikan (share) berita di media sosial (Facebook atau Whatsapp) yang isinya mendiskreditkan atau menjelek-jelekan calon presiden pilihan saya pada tahun 2019, sekalipun saya tidak yakin berita itu benar atau bohong (Hoax)





# **BAB 6**

## **PEMBAHASAN**

### **A. Karakteristik Responden**

Berbeda dari survei serupa yang dilakukan oleh LP2M IAIN Kediri pada tahun 2018, survei kali ini melibatkan lebih banyak responden (600 orang). Penambahan jumlah responden ini dimaksudkan untuk menguatkan hasil penelitian sehingga hasil survei benar-benar mencerminkan karakteristik masyarakat Kota Kediri dari aspek keberagaman agama. Jika sebelumnya survei melibatkan dua kelurahan dari masing-masing kecamatan, survei kali ini menyasar tiga kelurahan yang dianggap mewakili keragaman agama di Kota Kediri. Sebagaimana tampak dari Diagram 1.1, sekalipun responden didominasi oleh Muslim (71.1%), yang bisa dimaklumi karena sebagai agama mayoritas, partisipasi dari agama lain meningkat sehingga meningkatkan keterwakilan dari agama minoritas.

Hanya saja, partisipasi kelompok penghayat kepercayaan kurang terwakili karena penelitian menggunakan definisi

agama sebagaimana UU No. 1/PNPS/ 1965. Hal ini bisa dibayangkan ironi mengingat Kota Kediri juga menjadi rumah bagi komunitas yang di mata agama tidak dikategorikan sebagai agama ini. Keterlibatan aktif komunitas ini dalam wadah PAUB-PK juga menjadi kekhasan dialog antar agama di Kota Kediri yang tidak banyak dijumpai di wilayah-wilayah lain. Sejumlah perubahan regulasi yang memberi udara segar bagi penghayat kepercayaan (misalnya, Putusan MK No. 97/2016 tentang kolom kepercayaan di e-KTP bagi penghayat) perlu dilakukan penelitian khusus untuk melihat sejauh mana hak-hak sipil mereka dijamin dan direalisasikan di lapangan baik dalam bentuk kebijakan maupun tiadanya diskriminasi oleh masyarakat.

Perkembangan lain yang cukup mengembirakan dalam survei kali ini adalah semakin meningkatnya partisipasi kaum perempuan dalam mengisi survei, sebagaimana terlihat dari Diagram 1.2 (60.5%). Bagaimanapun juga, suara perempuan sangat penting di tengah masih kuatnya budaya Jawa Mataraman yang patriarkis di Kota Kediri. Sebaran responden di kalangan kaum perempuan ini juga mengindikasikan terjadinya pergeseran nilai-nilai patriarki di tengah masyarakat Kota Kediri. Angka ini juga menunjukkan bahwa kaum perempuan juga punya kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu antar agama sehingga sudah seharusnya mereka dilibatkan secara aktif dalam program-program kerukunan antar agama baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat.

Penanaman nilai-nilai keagamaan yang moderat dan toleran perlu ditanamkan sejak usia dini dengan dimulai dari keluarga yang di dalamnya perempuan punya andil yang sangat besar dalam membentuk karakter anak.

Diagram 1.3 dan 1.4 menunjukkan bahwa sebaran responden berdasarkan usia dan profesi/pekerjaan juga masih didominasi oleh generasi milenial (rentang usia 17 – 34 tahun). Dengan demikian, survei ini bisa jadi tolak ukur kerukunan di kalangan generasi milenial di Kota Kediri. Temuan ini sangat penting mengingat kelompok usia ini sangat rentan terpapar ideologi radikalisme dan konservatisme keagamaan. Baru-baru ini, sebuah survei “Literatur Keislaman Generasi Milenial” yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga, PPIM Jakarta, dan Convey Indonesia, menemukan bahwa generasi ini paling banyak mengakses konten keislaman melalui literatur populer yang rentan disusupi ideologi radikal.<sup>55</sup> Dengan demikian, perlu dipikirkan metode efektif penguatan moderasi keagamaan dan nasionalisme melalui media-media yang sesuai dengan karakteristik generasi milineal ini.

## **B. Indeks KUB: Beberapa Catatan Penting**

Secara umum, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2019 di Kota Kediri berada pada angka 3.91 (Tinggi), naik dari 3.76 (Tinggi) di tahun 2018. Hasil survei

---

<sup>55</sup> Pasca UIN Sunan Kalijaga, PPIM Syarif Hidayatullah Jakarta, Convey Indonesia, Penelitian “Literatur Keislaman di Kalangan Generasi Milenial,” tahun 2018.

ini semakin meneguhkan bahwa tagline 'Harmoni Kediri' benar-benar beresonansi dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Bagi masyarakat kota Kediri, perbedaan agama menjadi modal sosial yang berfungsi sebagai perekat sosial. Tanpa menafikan adanya potensi konflik antar agama, bisa dikatakan bahwa Kota Kediri sangat kondusif bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama.

Pada aspek toleransi, persepsi masyarakat Kota Kediri tentang perbedaan agama juga rata-rata tinggi. Radikalisme keagamaan tidak beresonansi kuat pada semua karakteristik responden. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga menutup ruang bagi gerakan-gerakan radikal keagamaan untuk tumbuh dan berkembang di Kota Kediri. Survei juga menunjukkan bahwa egoisme keagamaan paling dikaitkan dengan konflik antar umat beragama, melebihi politik dan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat Kota Kediri sudah cukup dewasa untuk membedakan antara persoalan agama dari kepentingan-kepentingan lain di luar agama. Temuan ini berbeda dari hasil penelitian tahun sebelumnya yang menempatkan politik sebagai faktor paling terkait dengan konflik keagamaan. Pergeseran cara pandang ini barangkali terkait dengan hiruk-pikuk pemilu 2019 yang, alih-alih memecah belah, malah menumbuhkan kesadaran politik di kalangan masyarakat Kota Kediri.

Temuan ini berkolerasi positif dengan sikap atau pengalaman untuk bekerja sama tanpa memandang identitas keagamaan. Masyarakat Kota Kediri meletakkan kerjasama

antar agama dalam bingkai relasi sosial seperti bertetangga dan pergaulan sehari-hari. Di ranah domestik, faktor agama masih memegang peran penting. Nikah beda agama tidak berterima di kalangan responden, kemungkinan karena dianggap terkait dengan urusan teologi (akidah). Terlepas dari benar atau salah dari sisi teologi, realitas nikah beda agama di tengah masyarakat, khususnya di daerah urban seperti Kota Kediri, perlu disikapi secara bijak, jangan sampai ketidaksepakatan memicu pelanggaran hak seseorang atau bahkan diskriminasi atau persekusi. Pembangunan tempat ibadah, berdasarkan temuan survei, juga diletakkan sebagai urusan sosial daripada teologi. Tiadanya keberatan mayoritas responden terhadap pembangunan tempat ibadah agama lain mengindikasikan bahwa pembangunan tempat ibadah lebih baik didudukkan pada persoalan legalitas sesuai perundang-undangan yang berlaku, bukan pada persoalan teologi (Kristenisasi, misalnya) yang bisa melebar dan berujung pada konflik antar agama.

Terkait dengan aliran keagamaan (misalnya, Ahmadiyah dan Syiah), mayoritas responden tidak terjebak pada labelisasi 'sesat' yang kerap disematkan pada kedua kelompok ini dan berujung pada persekusi di sejumlah daerah lain. Hanya saja, berdasarkan survei labelisasi 'sesat' ini masih tinggi di Kecamatan Mojojoto sehingga perlu diwaspadai dan diambil langkah antisipatif agar tidak melahirkan diskriminasi maupun persekusi terhadap aliran-aliran keagamaan yang dipandang 'sesat'. Hal serupa juga perlu

dilakukan terhadap perselisihan yang melibatkan orang beda agama yang, menurut survei, tingkat kejadiannya tergolong tinggi di tiga kecamatan. Masyarakat perlu dibekali kemampuan manajemen konflik sehingga bisa menyelesaikan perselisihan tersebut tanpa berujung pada kekerasan.

Pada aspek kesetaraan, problem mayoritas-minoritas tidak terlalu tampak di kalangan responden. Mereka menganggap bahwa tidak soal agamanya mayoritas atau minoritas, setiap pemeluk agama adalah sama-sama warga negara yang memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Patut diperhatikan dari temuan penelitian ini bahwa penyebaran agama terhadap pemeluk agama lain tidak terlalu memperoleh penerimaan di kalangan mayoritas responden. Dakwah atau misi adalah bagian inheren di sejumlah agama, baik terhadap kalangan sendiri maupun orang lain yang tidak seagama. Dakwah atau misi terhadap pemeluk agama lain bisa menjadi persoalan apabila dibarengi dengan menjelek-jelekan agama lain sehingga perlu ada pemahaman mengenai batasan-batasan dakwah atau misi terhadap orang yang tidak seagama. Identitas agama juga tidak terlalu berpengaruh terhadap jabatan publik.

Catatan penting pada aspek kesetaraan ini adalah pada isu penodaan agama. Temuan survei menunjukkan bahwa penodaan terhadap agama apapun patut dikenai sanksi hukum (penjara). Pada satu sisi, persepsi seperti ini sejalan

dengan PNPS No. 1/1965 tentang penodaan agama, hanya saja mengingat masih kaburnya definisi penodaan agama, isu ini bisa menjadi persoalan serius apabila tidak ditangani secara benar.

Indeks KUB pada aspek toleransi dan kesetaraan berimbang positif pada aspek kerjasama. Indeks kerjasama antar umat beragama rata-rata berada pada angka tinggi kecuali beberapa perbedaan di sejumlah isu. Keberadaan FKUB, forum resmi antar umat beragama, relatif tersosialisasikan dengan baik di semua kecamatan. Kemauan untuk bekerja sama antar umat beragama juga tinggi, hanya saja keaktifan dalam organisasi antar agama masih perlu ditingkatkan. Temuan survei ini menjadi kabar baik bagi FKUB, tapi juga sekaligus tantangan untuk semakin melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan antar agama, terutama dalam bentuk kegiatan sosial dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pada aspek kebijakan pemerintah, kinerja pemerintah Kota Kediri perlu diapresiasi. Survei menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi sangat positif terhadap kebijakan pemkot dalam mengelola keberagaman agama di Kota Kediri. Namun demikian, penelitian ini belum bisa mengungkap pelanggaran terhadap kebebasan beragama di lapangan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Misalnya, masih ditemukannya yayasan tertentu yang memaksakan pendidikan agama tertentu pada siswa

agama lain,<sup>56</sup> perlu mendapatkan perhatian serius karena jelas-jelas melanggar UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, pasal 12, ayat (1) huruf a: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Demikian pula implementasi Putusan MK No. 97/2016 tentang kolom kepercayaan di e-KTP bagi penghayat. Sosialisasi perundang-undangan dan pengawasan terhadap implementasinya perlu memperoleh perhatian serius dari pemangku kebijakan Kota Kediri.

---

<sup>56</sup> Sebagaimana terungkap dalam diskusi laporan penelitian antara indeks KUB Kota Kediri 2019, tanggal 18 September 2019.



# **BAB 7**

## **KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA KEDIRI: PELUANG DAN TANTANGAN**

### **A. Faktor Penunjang KUB**

Kondisi KUB yang toleran dan harmonis di Kota Kediri merupakan hasil dari pelbagai faktor yang berkait-kelindan satu dengan yang lain. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah faktor historis, kultur, dukungan pemerintah, doktrin agama yang moderat, tingkat pendidikan yang semakin baik, aktifis lintas agama yang gigih, serta peran strategis organisasi lintas agama. Beragam faktor itu tidak bisa berdiri sendiri atau menihilkan peran yang lain, karena masing-masing bisa berfungsi secara efektif sebagai hasil interaksi sinergis dengan elemen yang lain. Adapun diskripsinya sebagai berikut;

1. Secara historis, Kediri merupakan pusat ekonomi dan politik sejak jaman Hindu-Budha, Mataram Islam, VOC, Hindia Belanda, sampai sekarang di bawah NKRI sehingga menempatkan Kediri sebagai wilayah yang terbuka bagi masuknya berbagai unsur budaya,

agama, ras, etnisitas, pilihan politik dan sebagainya. Fakta semacam ini menjadikan masyarakat Kediri sudah lama terbiasa dengan kepelbagaian tersebut, karena eksistensinya akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dan bertoleransi. Islam sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Gus Reza, sudah datang sejak sebelum era Wali Songo yang dibuktikan dengan keberadaan makam Syekh Wasil Syamsuddin di Setono Gedong, tokoh penyebar Islam pertama di Kediri yang ditengarai hidup di abad 12 M. Selain itu, tokoh lain yang menurutnya penting adalah Ki Ageng Corekan yang juga hidup sebelum era Wali Songo. Contoh lain yang disebutkan Gus Reza adalah Tionghoa sebagai komunitas dan agama yang sudah ada di Kediri sejak era pasca Kerajaan Singasari.<sup>57</sup> Hal ini diperkuat oleh Profesor Fauzan Saleh yang memaparkan bahwa orang-orang Tionghoa sudah ada sejak lama. Bahkan Tan Khoen Swie, seorang tokoh Tionghoa Kediri abad 19 M, memberikan sumbangan yang penting di dalam memajukan penerbitan. Salah satu yang terpenting adalah usahanya mentranskrip dan menerbitkan Serat Babad Kadhiri ke dalam aksara latin.<sup>58</sup> Beberapa situs yang lain semisal Klenteng Tjio Hwie Kiong milik Konghuchu, candi Setono Gedong peninggalan Hindu-

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Gus Reza, Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri, 04Agustus 2018

<sup>58</sup> Wawancara dengan Profesor Fauzan Saleh, IAIN Kediri, 30 Agustus 2018

Muslim, dan Gereja Merah GPIB, sebetulnya juga menunjukkan kemajemukan Kediri memiliki akar historis yang panjang, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan di dalam membentuk nilai, pandangan hidup dan sikap masyarakat dalam mengelola perbedaan.

2. Kultur masyarakat Kediri menjadi salah satu penyangga penting dari KUB yang berjalan harmonis. Dalam peta kebudayaan di Jawa Timur, Kediri menjadi bagian dari budaya *Matraman* yang bercirikan sikap adaptif terhadap agama. Semua agama-agama besar yang masuk dalam budaya *Matraman* dibaca dan diakulturasikan dalam budaya *Matraman*. Lanskap budaya inilah yang seringkali menjadi titik temu antar agama, meski secara teologis agama-agama tersebut tidak bisa dipertemukan. Menurut Fachrur Rozi<sup>59</sup>, ada perbedaan signifikan antara Kediri yang berkultur *Matraman* dengan Probolinggo dan Jember yang berkultur *Pandhalungan*. Di Kediri, masyarakat dan tokoh-tokoh antar agama bisa berinteraksi, bertemu, bersilaturahmi dan menjalin kerjasama dengan begitu intens, bahkan dengan aliran-aliran seperti LDII dan Penghayat Kepercayaan. Di Jember dan Probolinggo, hal tersebut sulit dibayangkan akan terjadi. Meskipun di kedua daerah tersebut tidak terjadi konflik yang berskala luas, namun komunikasi antar agama tidak berlangsung

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Fachrur Rozi, Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, 30 Agustus 2018. Dalam pengalamannya yang panjang berkarir di Kementerian Agama di Jember, Probolinggo dan kemudian sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, Rozi memberikan telaah perbandingan yang menarik.

sebagaimana di Kediri. Suatu kesimpulan sementara bisa diajukan, bahwa kebudayaan *Pandhalungan* belum mampu menjadi wadah kultural yang mampu mempertemukan agama-agama yang secara teologis berbeda, seperti halnya budaya *Matraman* di Kediri.

3. Dukungan pemerintah pada terwujudnya KUB merupakan salah satu unsur yang penting dikemukakan di sini. Sebetulnya pemerintah memiliki kepentingan yang besar atas terwujudnya KUB, karena itu menjadi syarat mutlak dari stabilitas politik dan ekonomi. Konsep “Kerukunan Umat Beragama” dirumuskan pemerintah sejak jaman Orde Baru. Bahkan, ide itu tersebut dikembangkan lebih jauh dengan konsep trilogi kerukunan umat beragama yang dilontarkan pertama kali oleh Menteri Alamsyah Ratu Perwira Negara sebagai pengembangan gagasan pendahulunya, Mukti Ali, tentang kerukunan agama berbasis ‘setuju dalam perbedaan’ (*agree in disagreement*). Konsep Trilogi Kerukunan ini secara garis besar mencakup: (1) Kerukunan intern umat beragama; (2) Kerukunan antar umat beragama; dan (3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Semasa kepemimpinan Menteri Agama Munawir Sjadzali, konsep trilogi kerukunan ini kemudian diistilahkan dengan Tri Kondial (Tiga Kondisi Ideal) kerukunan umat beragama.<sup>60</sup> Konsep ini menjadi pilar pengembangan kerukunan umat beragama di masa Order Baru.

---

<sup>60</sup> Imam Talkhah, “Prolog”, dalam Haidlor Ali. (ed.), *Survey Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan

Di era reformasi, seiring dengan merebaknya isu SARA dan ancaman disintegrasi bangsa, pemerintah kemudian membentuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di setiap propinsi, kabupaten dan kota sebagai mitra pemerintah di dalam menjaga dan mewujudkan KUB. FKUB Kota Kediri terbentuk sejak tahun 2000 yang terdiri dari 6 unsur agama, yaitu; Islam, Hindu, Katolik, Kristen, Budha, Konghuchu. Selain itu, di Kota Kediri juga terdapat PAUB-PK (Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan) yang berdiri tahun 1998 berdasarkan inisiatif dari tokoh-tokoh agama setempat. Lebih luas dari FKUB, PAUB-PK mewadahi 9 unsur, yaitu NU, Muhammadiyah, LDII, Hindu, Katolik, Kristen, Budha, Konghuchu, dan Penghayat Kepercayaan. Di samping 2 organisasi tersebut, tahun 2010 beberapa tokoh agama mengambil inisiatif mendirikan PaLM (Paguyuban Lintas Masyarakat). Berbeda dengan dua organisasi sebelumnya, wilayah kerja PaLM lebih kepada pemuda lintas agama dengan berupaya melakukan kaderisasi tokoh-tokoh muda yang moderat dan pluralis.<sup>61</sup> Pemerintah Kota Kediri memberikan dukungan moral, gagasan, fasilitas dan dana bagi eksistensi tiga organisasi tersebut.<sup>62</sup> Dalam soal moral dan gagasan, Pemkot jelas sangat berkepentingan terhadap terwujudnya KUB

---

Diklat, Kementerian Agama RI, 2013), xvi.

<sup>61</sup> Wawancara dengan H. Moh. Salim, Kediri, 28 Agustus 2018.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Gus Reza, Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri, 04 Agustus 2018.

sehingga setiap upaya yang mendukung hal itu selalu direspon positif, melalui perlindungan hukum, dialog dan supervisi. Fasilitas dan dana juga difasilitasi untuk mendukung kegiatan, meskipun dalam jumlah yang terbatas, sehingga mampu melaksanakan kegiatan, seperti Sekolah Multukultural, Jalan sehat lintas agama, bazar, silaturahmi, sarasehan dan diskusi.<sup>63</sup>

4. Peran strategis dari organisasi lintas agama dan para penggeraknya yang gigih sangat penting diuraikan di sini, sebab upaya KUB memerlukan wadah gerakan dan institusionalisasi. Seperti diuraikan di atas, organisasi pertama yang patut disebutkan adalah PAUB-PK yang berdiri karena keprihatinan dan inisiatif masyarakat sendiri. Berdirinya PAUB-PK diawali dari dua bulan setelah peristiwa Mei 1998 di Jakarta, tepatnya 8 Juli 1998, para pimpinan umat berbagai agama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kediri mengadakan doa bersama. Atas prakarsa K.H. Anwar Iskandar, K.H. Imam Yahya Malik dan Amien Djoenaidi doa bersama itu dilaksanakan, diawali di UNISKA Kediri. Setelah itu, dukungan dari tokoh-tokoh agama dan masyarakat pun bermunculan. Setelah dilakukan evaluasi, forum doa ini kemudian sepakat menindaklanjuti dengan membentuk Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (PAUB-PK) Kota Kediri pada tanggal 28 Juli 1998. Pada awalnya,

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Pak Usman Arif, Kediri, 09Agustus 2018.

unsur Islam dalam PAUB banyak diisi dari NU. Lalu dalam perkembangannya, Muhammadiyah dan LDII turut bergabung sejak 3 September 2001. Ketua pertama adalah H. Ma'rif Anas kemudian estafet kepemimpinan dilanjutkan H. Moh Salim. Visi dan program dari PAUB-PK lebih kepada menjalin komunikasi kultural antar tokoh agama, bahkan di masa-masa awal hal itu dilakukan dengan sekedar makan-makan, tanpa dialog dan ceramah.<sup>64</sup>

Organisasi berikutnya adalah FKUB yang pembentukannya merupakan amanat undang-undang dan diinisiasi pemerintah. FKUB memiliki program yang lebih jelas dan sistematis. Kegiatan-kegiatan FKUB di antaranya adalah jalan sehat lintas agama, bazar, silaturahmi, sarasehan dan diskusi. Meskipun pada praktiknya, baik FKUB maupun PAUB-PK digerakkan oleh aktor yang sama sehingga dalam pelaksanaannya sulit dipisahkan.<sup>65</sup> H.Moh.Salim menceritakan bahwa PAUB-PK dan FKUB sering melakukan kunjungan bersama ke lokasi agama, kantor pemerintah, kantor kepolisian dan tentara, dan Gudang Garam. Kunjungan dilakukan setiap jumat kliwon, 35 hari sekali, dan sering juga melibatkan perguruan tinggi

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan H. Moh. Salim, Kediri, 28 Agustus 2018.

<sup>65</sup> Fauzan Saleh menilai bahwa hal ini menjadi kelemahan dialog antar agama di Kota Kediri yang relatif digerakkan oleh aktor yang sama, tanpa regenerasi yang signifikan. Untuk sekarang hal tersebut memang masing efektif karena aktor-aktor tersebut merupakan tokoh di komunitas agama masing-masing. Wawancara dengan Profesor Fauzan Saleh, IAIN Kediri, 30 Agustus 2018

dan perbankan. PAUB-PK dan FKUB mendapat bantuan dana dari pemerintah di setiap kegiatan. Dua lembaga ini juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti BNN, Rumah Sakit Muhammadiyah, RS Lirboyo, RS kusta, RS Baptis, IAIN Kediri, dan lain sebagainya.

Organisasi terakhir adalah PaLM (Paguyuban Lintas Masyarakat) yang didirikan tahun 2010. Ketuanya sejak berdiri sampai sekarang adalah Taufiq Alamin, seorang dosen di Fakultas Ushuluddin IAIN Kediri. PaLM berupaya menjadi wadah dialog pemuda antar agama sehingga pemahaman keagamaan yang toleran dan harmonis bisa terus dijaga kelangsungannya antar generasi. Karena itu, PaLM secara rutin mengadakan Sekolah Multikultural yang diikuti pemuda dari berbagai agama dan aliran.

5. Kota Kediri juga diuntungkan karena dihidupi oleh tradisi dan paham keagamaan yang moderat. Lembaga pendidikan seperti Pesantren Lirboyo, Ploso, Maunah Sari dan seterusnya berperan penting di dalam menyemai moderatisme paham keagamaan ini. Radikalisme agama tidak mendapatkan tempat karena tidak mampu merebut perhatian masyarakat yang terlanjur dibentuk oleh sikap agama yang tidak ekstrem. Bahkan, organisasi agama yang konservatif seperti LDII bisa duduk bersama dan ambil bagian di dalam PAUB-PK, FKUB dan PaLM, atau dalam konteks yang lebih luas di dalam mewujudkan masyarakat Kota Kediri yang harmonis.



Suatu hal yang penting dikemukakan adalah peran IAIN Kediri. Tidak bisa dipungkiri, IAIN Kediri berperan signifikan di dalam melahirkan kader intelektual dan aktifis lintas agama. Dosen-dosen IAIN, seperti Profesor Fauzan Saleh, H. Ahmad Subakir dan Taufiq Alamin, merupakan sebagian nama yang terlibat aktif di dalam organisasi maupun dialog antar agama. IAIN Kediri awalnya didirikan dengan membuka Jurusan Ushuluddin, yang salah satunya menawarkan Prodi Perbandingan Agama atau PA (sekarang Studi Agama-Agama/SAA) dan SA (Sosiologi Agama/SA).<sup>66</sup> Dua Prodi yang berkaitan erat dengan isu di atas. Inilah yang menurut Pak Ketut memiliki hubungan erat, antara Kota Kediri sebagai *Pilot Project* Kerukunan Umat Beragama dengan pembukaan Fakultas Ushuluddin di IAIN. Tidak mengherankan jika setiap tahun, Prodi tersebut melahirkan sarjana dan karya penelitian yang berfungsi strategis bagi penguatan KUB, baik pada level teoritis maupun praktis. IAIN Kediri juga seringkali menjadi tuan rumah dialog, silaturahmi dan seminar antar agama.

## **B. Faktor Penghambat KUB**

Sebagaimana yang telah terangkum dalam bab sebelumnya, bahwa masyarakat Kota Kediri dengan berbagai karakter, kultur dan ciri khasnya masing-masing-

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Pak Ketut, Kediri, 14 Agustus 2018.

ternyata memiliki tingkat kerukunan umat beragama yang terbilang cukup tinggi. Kenyataan demikian tidak lantas menjadikan dinamika kerukunan umat beragama yang ada di Kota Kediri bebas hambatan. Berdasarkan observasi dan interview yang dilakukan oleh tim peneliti, terdapat beberapa faktor yang dinilai dapat menghambat terciptanya kehidupan harmonis umat beragama yang ada di kota Kediri. Di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Pendirian tempat ibadah yang dilakukan tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat setempat. Hal ini menuai banyak protes, karena dipandang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Protes-protes seperti di atas dapat menimbulkan gejolak yang mengganggu kerukunan. Fachrur Rozi, selaku Kepala Kemenag Kota Kediri menyatakan bahwa pendirian tempat ibadah yang dilakukan tanpa prosedur yang sah dapat memicu terjadinya gesekan-gesekan antar umat beragama.<sup>67</sup>
2. Pemaksaan kehendak oleh sebagian oknum dalam pemerintahan untuk mengikuti tradisi atau ajaran tertentu dalam agama. Persoalan agama dan keyakinan adalah domain manusia secara individu. Tidak ada seorangpun yang berhak untuk memaksakan keyakinan tertentu pada orang lain. Jika hal ini terjadi, maka cita-cita kerukunan dan perdamaian antar umat beragama sangat sulit untuk diraih. Salah seorang informan,

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Fachrur Rozi, Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, 30 Agustus 2018.

Fauzan Saleh, guru besar IAIN Kediri yang juga menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Kota Kediri, menceritakan bahwa beberapa waktu lalu pemerintah kota pernah mengadakan sebuah acara yang di dalamnya memasukkan ritual-ritual semacam sesajen, sedekah bumi atau yang lainnya. Mirisnya, -menurut beliau, pemerintah saat itu menghimbau bahkan cenderung mengharuskan seluruh warga untuk menghadiri acara tersebut. Padahal, dalam pandangan beliau tradisi-tradisi seperti di atas kurang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>68</sup>

3. Efek situasi politik.<sup>69</sup> Persaingan politik dalam memperebutkan kekuasaan dan sumber daya ekonomi yang dilakukan dengan berbagai cara kotor, menyimpang dari prosedur dan koridor hukum yang sudah diundangkan. Penggalangan kelompok massa, termasuk di dalamnya kelompok agama tertentu di jalan raya dan tempat-tempat umum dalam upaya menghimpun dukungan, untuk memenangkan Pemilu atau Pemilukada. Penggalangan kelompok massa tersebut tidak jarang diiringi dengan perilaku kekerasan dan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan kerusuhan. Hal ini tentu saja menghambat cita-cita mulia kerukunan umat beragama.
4. Masih kecilnya antusiasme masyarakat untuk turut serta aktif dalam organisasi yang bergerak di bidang kerukunan dan perdamaian agama semacam FKUB, PAUB-PK atau

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan. Fauzan Saleh, IAIN Kediri, 30 Agustus 2018.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Fachrur Rozi, Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, 30 Agustus 2018.

PaLM. Dari tahun ke tahun, baik pengurus maupun anggota organisasi di atas masih didominasi orang-orang lama. Mereka yang hadir di pertemuan silaturahmi adalah orang yang sama dan terbatas pada orang tertentu saja. Praktis, kondisi tersebut sedikit mempersulit untuk mewujudkan kesadaran akan pentingnya menjaga persaudaraan antar sesama pemeluk agama secara menyeluruh.

5. Kurangnya kesadaran sebagian umat beragama tertentu tentang arti pentingnya menghargai perbedaan pendapat. Acapkali perbedaan pandangan dalam suatu agama atau aliran tertentu dapat memicu konflik. Di wilayah manapun, termasuk di Kota Kediri- masih saja ditemukan segilintir umat beragama yang cenderung intoleran. Baginya, apa yang mereka yakini harus pula diimani oleh orang lain. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa sikap toleransi ini sedikit sulit untuk ditransformasikan dalam realitas keragaman yang ada dalam sebuah negara. Di antaranya, negara sendiri terdiri atas pelbagai entitas yang mempunyai *mindset* lebih cenderung kepada intoleransi daripada toleransi. Apalagi, entitas tersebut hanya memahami demokrasi secara prosedural, yaitu hegemoni mayoritas atas minoritas atau sebaliknya, ketundukan mayoritas atas minoritas. Sementara itu, pemerintah tidak mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dalam rangka menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Akibatnya,

kelompok minoritas senantiasa berada di bawah ancaman kelompok yang mengklaim sebagai kelompok mayoritas.<sup>70</sup> Jika kondisi demikian dibiarkan terus menerus berlangsung, maka tentu akan menghambat kerukunan umat beragama di Indonesia umumnya dan khususnya di kota Kediri.

6. Munculnya beberapa aliran kepercayaan yang mempunyai faham dan pengamalan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran kelompok mayoritas (*mainstream*). Ahmadiyah misalnya, kelompok ini dianggap oleh sebagian besar kelompok arus utama dapat merusak ajaran Islam murni dan meresahkan kelompok umat beragama lainnya. Aksi protes menentang kehadiran kelompok agama yang dianggap "menyimpang" ini, pada gilirannya dapat memicu gesekan umat beragama dan mengganggu stabilitas kerukunan internal umat Islam khususnya, dan seluruh umat beragama pada umumnya.
7. Persoalan kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan salah satu faktor yang amat berpengaruh terhadap upaya mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Jarak sosial atau ketimpangan ekonomi antara kota dan desa, antara si miskin dan si kaya, antara majikan dengan buruhnya, antara kelompok pengusaha dengan kelompok pedagang kecil, dapat memunculkan keresahan dan konflik antar kelompok masyarakat, termasuk antar kelompok pribumi dengan warga keturunan Tionghoa.

---

<sup>70</sup> Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 4.

8. Efek globalisasi dan budaya modern, seperti pergaulan bebas, dan budaya ekstrimisme yang sudah sangat mengkhawatirkan merupakan rongrongan terhadap keutuhan keluarga yang menjadi basis masyarakat, merusak kearifan lokal dan pada akhirnya tentu saja akan semakin mempersulit cita-cita luhur umat manusia, yakni kerukunan antar umat beragama.

Beberapa faktor penghambat di atas bukan berarti tidak bisa diselesaikan dan diantisipasi sama sekali. Dalam hal ini, diperlukan upaya-upaya konkrit, intensif, terarah serta kontinyu yang melibatkan sebanyak mungkin pihak terkait.<sup>71</sup> Untuk mengatasinya tentu saja harus melibatkan seluruh komponen, termasuk tokoh-tokoh keagamaan, masyarakat dan pemerintah, sesuai dengan kondisi obyektif di masing-masing wilayah baik di tingkat pusat, provinsi, maupun di tingkat kabupaten, kota dan kecamatan di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Kota Kediri dengan menggunakan metode dialog, diskusi, sarasehan, tatap muka, kerjasama atau yang lainnya.

### **C. Potensi Kerukunan dan Konflik**

Potensi kerukunan umat beragama berada dalam ranah sosial, di mana masing-masing umat yang berbeda agama melakukan interaksi dalam kehidupan sosial

---

<sup>71</sup> Mursyid Ali dalam Pengantar "Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia", (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama, 2009), hlm. xix

mereka. Dengan kata lain, mereka tidak dipertemukan dalam lintas iman, melainkan dalam lingkungan sosial. Ini artinya, kerukunan beragama tidak bisa dan memang tidak perlu menyentuh ranah teologis. Ranah sosial inilah yang harus dipelihara, dijaga sebagai bentuk ruang dialog. Secara umum, dari hasil penelitian di beberapa lokasi ditemukan ada faktor-faktor yang bisa menjadi sarana/wadah sosial terciptanya kerukunan yaitu, tradisi, adat/budaya, tokoh agama, dan organisasi kelembagaan masyarakat/pemerintah yang mestinya dapat dikembangkan.

Dari salah satu informan<sup>72</sup> mengatakan bahwa pola interaksi umat beragama yang mengarah pada bentuk kerukunan yang terwadahi dalam tradisi lokal. Di Kota Kediri ditemukan tradisi gotong-royong, tahlilan maupun kematian di lingkungan sekitar. Gotong royong dalam istilah Jawa disebut *sambatan*, yaitu melakukan kegiatan bersama untuk sebuah tujuan tertentu. Gotong royong biasa dilakukan dalam rangka memperbaiki rumah, sarana sosial, perhelatan perkawinan, perkuburan, dan aktifitas-aktifitas sosial lainnya termasuk perbaikan tempat ibadah. Dalam acara gotong-royong, tokoh yang paling berperan yaitu tokoh masyarakat.<sup>73</sup>

Termasuk kegiatan Lebaran bersama dimaksudkan sebagai bentuk ungkapan saling memaafkan atas kesalahan yang dilakukan sebagai sesama manusia. Lebaran bersama diisi dengan saling mengunjungi antar kerabat, saudara,

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Pak Ketut, Kediri, 14 Agustus 2018.

<sup>73</sup> Ibid.

teman, tanpa membedakan agama. Dalam pertemuan itulah, mereka bisa saling memberikan maaf atas kesalahan yang dilakukan selama bergaul, tanpa membedakan latar belakang agama.

Pada ranah sosial, pola interaksi antar umat beragama di Kota Kediri mengarah pada kekuatan dan pengaruh tokoh masyarakat masing-masing agama dengan munculnya organisasi PAUB-PK yang didirikan pasca reformasi oleh KH Anwar Iskadar dan tokoh agama lain termasuk pengakuan terhadap penganut kepercayaan.<sup>74</sup> Dengan adanya organisasi PAUB-PK ini tentu diharapkan bisa mempermudah pembentukan pola kerukunan umat beragama di Kota Kediri.

Salah satu agenda besar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan, kesatuan bangsa dan integrasi umat beragama dalam membangun perdamaian dan kesejahteraan hidup bersama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan kearah tersebut adalah masalah kerukunan nasional, termasuk di dalamnya hubungan antar umat beragama yang harmonis dan integeratif. Persoalan ini semakin krusial karena terdapat serangkaian kondisi sosial yang menyuburkan konflik, sehingga terganggu kebersamaan dalam membangun peradaban universal. Walaupun pemerintah tengah berjuang untuk menghadapi ketegangan antar internal maupun antar umat beragama namun kita tidak bisa menutup mata bahwa potensi konflik

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Usman Arif, Kediri, 09 Agustus 2018.



yang menyulut hal tersebut dapat terjadi selalu ada disekitar kita. Adapun beberapa potensi konflik yang menjadi faktor ketidak harmonisan dalam beragama diantaranya adalah :

Pertama *Faktor Politik*, adalah faktor yang paling sering muncul dalam berbagai masalah konflik yang berbau SARA terutama konflik yang bermuatan agama. Faktor ini sangat dominan sebab terjadinya kerusuhan sosial di berbagai daerah di negeri ini selalu disertai dengan kepentingan politik kalangan tertentu, terlepas dari beragam analisis yang ada selalu saja ada pihak yang berkepentingan yang selalu mengambil keuntungan dari kondisi yang terjadi.

Kedua, *Faktor ekonomi* menjadi faktor yang cukup jelas sebagai pemicu potensi konflik agama, karena seperti yang kita tahu kesenjangan antara si kaya dan miskin menjadi jurang pemisah yang cukup dalam untuk menjerumuskan seseorang tersesat dalam pilihan hidupnya, sehingga mengakibatkan gesekan yang sangat prinsipil sekali seperti dalam hal keyakinan seseorang. Dibeberapa kasus bisa kita lihat bahwa faktor ekonomi menjadi faktor penting terjadinya sebuah konflik. Hal ini sangat dimungkinkan sekali mengingat bahawa ketika kita berbicara tentang agama, maka sebenarnya kita tengah mendiskusikan hal yang paling sensitif yakni masalah keyakinan yang rentan akan konflik. Maka dari itu konflik agama tidak jarang dimanfaatkan segelintir pihak untuk menjadikannya sebagai pengalihan isu yang ada atau mendapatkan keuntungan tertentu.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ki Sutarto, Kediri, 14 Agustus 2018.

Ketiga, *Faktor Budaya /Lokalitas Dan Etnisitas*, Faktor ini terutama muncul sebagai akibat dari migrasi penduduk, baik dari desa ke kota maupun antar pulau. Selanjutnya masalah etnisitas, Indonesia memiliki potensi disintegratif yang tinggi sebab terdiri dari 300 kelompok etnis yang berbeda-beda dan berbicara lebih dari 250 bahasa. Faktor ini akan menjadi pemicu dengan menguatnya etnisitas seperti penduduk asli atau putra daerah dan pendatang yang dengan mudah dapat menyulut perbedaan-perbedaan yang tak jarang berujung pada konflik, bahkan kerusuhan sosial. Faktor lokalitas dan etnisitas yang intens ini akan mengakibatkan gesekan religious

Keempat, *Faktor Agama*, adalah faktor yang bersumber dari agama itu sendiri baik secara internal maupun eksternal.<sup>76</sup> Faktor yang bersumber dari agama secara tidak langsung sebenarnya yang paling bertanggung jawab dalam mempengaruhi kepribadian dan pola pandang seseorang dalam melihat suatu masalah oleh karena itu, potensi konflik yang muncul karena persoalan agama biasanya dipicu oleh kurangnya pemahaman yang baik dalam melihat persoalan agama dan bagaimana seharusnya tindakan yang diambil terkait konflik agama tersebut serta bagaimana cara penyelesaiannya. Adapun beberapa potensi konflik yang muncul dan sering terjadi karena faktor agama.

Walaupun pemerintah Indonesia mengakui kebebasan untuk memeluk agama namun, konflik antar agama kadang-

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan KH. Abdul Hamid, Kediri, 10 Agustus 2018.

kadang tidak terelakkan. Sehingga dapat menimbulkan konflik kehidupan keberagamaan. Konflik, perselisihan, percekocokan, pertentangan, merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar, karena dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari orang pasti menghadapi konflik, demikian juga dalam kehidupan beragama pasti 'akan terjadi konflik, terutama jika menyangkut hubungan antar umat yang berbeda agama. Besar kecilnya konflik dalam kehidupan antar umat beragama ditentukan oleh tingkat interaksi sosial dari para pemeluk agama masing-masing. Di dalam masyarakat majemuk, faktor penyebabnya sangat banyak, ditambah lagi dengan agama yang majemuk, faktor penyebabnya akan sangat kompleks.



## **BAB 8**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil survei di atas, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kota Kediri pada tahun 2019 adalah 3.91 (Tinggi). Dengan demikian, Indeks KUB Kota Kediri Tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang berada di angka 3.76 (Tinggi). Hasil ini menjadi cerminan bahwa secara umum Kota Kediri adalah kota yang kondusif bagi terciptanya kerukunan umat beragama. Dari empat variabel yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu toleransi, kesetaraan, kerjasama dan kebijakan, semuanya mendapatkan angka yang tinggi dengan rincian; Toleransi = 3.82, Kesetaraan = 4.04, Kerjasama = 3.75, dan Kebijakan = 4.03

Sedangkan secara kualitatif, kondisi di atas terwujud karena pelbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah faktor historis, kultur, dukungan pemerintah, doktrin agama yang moderat, tingkat pendidikan yang semakin baik, aktifis

lintas agama yang gigih, serta peran strategis organisasi lintas agama. Beragam faktor itu tidak bisa berdiri sendiri atau menihilkan peran yang lain, karena masing-masing bisa berfungsi secara efektif sebagai hasil interaksi sinergis dengan elemen yang lain. Dengan kata lain, dinamika yang terjadi dan terus berubah akan sangat mempengaruhi kualitas KUB di Kota Kediri, apakah semakin meningkat atau mengalami degradasi. Seperti juga diuraikan dalam penelitian ini, regenerasi tokoh dan aktifis lintas agama di Kota Kediri tidak berjalan dengan memuaskan, stigma dan kecurigaan terhadap Ahmadiyah dan Syi'ah masih kuat, hasil penelitian yang masih sedikit tentang kehidupan agama di Kota Kediri, maraknya hoax dan ujaran kebencian, kesenjangan ekonomi, dan lain sebagainya, menjadi faktor lain yang juga berpengaruh. Kondisi KUB di Kota Kediri di waktu-waktu yang akan datang, akan sangat ditentukan oleh kesediaan banyak pihak untuk berkomunikasi satu sama lain, mengatasi kelemahan dan bibit-bibit konflik seperti diuraikan di atas.

## **B. Rekomendasi**

### **B.1. Barenlitbang Pemkot Kediri**

- a. Merencanakan secara sistematis dan terencana kajian lanjutan tentang kehidupan keagamaan di Kota Kediri, dengan fokus pada simpul-simpul utama penyangga kerukunan umat beragama di Kota Kediri, seperti peran Pemerintah dan

Pemuka Agama, FKUB dan PAUB-PK, Kearifan Lokal, Moderasi Keagamaan, dst. Penelitian perlu juga dilakukan terhadap implementasi kebijakan di akar rumput.

- b. Mempublikasikan hasil penelitian terkait pengelolaan keberagaman di Kota Kediri dalam bentuk artikel, buku, atau sejenis sehingga bisa dibaca oleh publik dan dicontoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia.
- c. Menyediakan saluran informasi dan penguatan kerukunan agama di Kota Kediri melalui media sosial yang mudah diakses dan menarik bagi generasi milineal.

## **B.2. Kementerian Agama**

- a. Meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan, khususnya bagi pemuka agama dan guru agama, yang mengedepankan moderasi keagamaan.
- b. Memperbanyak penyuluh agama di masyarakat dan juga konselor keagamaan di lembaga-lembaga terkait seperti sekolah, rumah sakit, kepolisian, dinas sosial, dan sebagainya.
- c. Meningkatkan kualitas pemahaman antar agama di kalangan penyuluh atau konselor keagamaan melalui pendidikan atau pelatihan.
- d. Bersama lembaga terkait, memperbanyak event-event kerukunan antar umat beragama, seperti

festival kerukunan umat beragama atau pekan perayaan kerukunan antar agama.

- e. Memberikan penghargaan dalam bentuk 'Award Harmoni Keagamaan' bagi tokoh yang dianggap berperan memperjuangkan kerukunan antar umat beragama di Kota Kediri.

### **B. 3. Dinas Pendidikan**

- a. Bekerjasama dengan Kemenag dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pendidikan agama yang berbasis moderasi keagamaan.
- b. Memastikan pendidikan agama di lembaga pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.
- c. Melakukan kajian terhadap segala bentuk intoleransi dan penyebaran ideologi radikal di lembaga pendidikan, baik di tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi

### **B.4. FKUB/PAUB-PK**

- d. Memperkuat peran FKUB/PAUB-PK melalui kerjasama antar agama dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi.
- e. Melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama di berbagai level kelembagaan masyarakat, seperti sekolah, kampus, kecamatan hingga kelurahan.



- f. Melibatkan secara aktif kaum perempuan dalam keanggotaan maupun kegiatan FKUB/PAUB-PK.
- g. Melakukan kaderisasi pegiat atau duta-duta kerukunan antar umat beragama, mulai dari kalangan remaja hingga tokoh agama.

#### **B. 5. Kecamatan/Kelurahan/RW/RT**

- a. Memperbanyak kegiatan sosial yang melibatkan berbagai agama atau aliran kepercayaan di lingkungan sekitar.
- b. Bersama institusi terkait, melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama terhadap warga.
- c. Mensosialisasikan kerukunan antar umat beragama melalui pengajian atau acara keagamaan warga dengan mengundang penceramah yang moderat.
- d. Membuat basis data warga berdasar agama atau aliran kepercayaan serta potensi atau situasi konflik yang ada sehingga bisa dilakukan tindakan antisipatif.



## REFERENSI

- Ahmad, Haidlor Ali (Editor), *Potret Kerukunan Umat Beragama di Jawa Timur Tahun 2011*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011).
- Assyaukanie, Lutfhi. *Ideologi Islam dan Utopia; Tiga model negara demokrasi di Indonesia*, (Jakarta; Freedom Institute, 2011).
- Banawiratman S.J., JB., “Bersama Saudara Saudari Beriman Lain”, dalam Abdurrahman Wahid, dkk., *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993).
- Bagir, Zainal Abidin. “Membaca beragam wajah Islam di Indonesia”, dalam Martin van Bruinessen, *Concervative Turn; Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, (Bandung; Mizan Pustaka, 2014).

----- . dkk, *Kerukunan dan Penodaan Agama, Alternatif Penanganan Masalah*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM, 2017).

----- .dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM, 2012).

----- .dkk, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM, 2011).

Eck, Diana L., *A New Religious America: How a "Christian Country" Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation*, (San Fransico: Harper San Fransisco, 2001).

Fauzi, Ihsan Ali, dkk, *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme; Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017)

Gutmann, Amy. *Identity in Democracy* (New Jersey: Princeton University Press, 2003).

Hasani, Ismail Indeks. *Hak Asasi Manusia tahun 2014*, (Jakarta; Setara Institute, 2014)

Hermawati, Rina, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati, "Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung," *UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology*, Volume 1 (2) Desember 2016.

- Hefner, Robert W. & Ihsan Ali Fauzi, *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia; Sejarah, Teori dan advokasi*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya UGM, 2014).
- Khalikin, Ahsanul dan Fathuri (ed.), *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016).
- Mulder, Niels, *Mysticism and Everyday Life in Cotemporary Java: Cultural Persistence and Change*,. (Singapore: Singapore University Press, 1978).
- Parekh, Bikhu. *Rethinking Multiculturalism; Cultural diversity ang political theory*, (Boston; Harvard University Press, 2002).
- Poerwadarmita, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, balai Pustaka, 1980).
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia modern; 1200 M – 2004 M*, (Jakarta; Serambi, 2001).
- Ropi, Ismatu, *Religion and Regulation in Indonesia*, (Singapore: Palgrave Macmillan, 2017).
- Sairin, Weinata Sairin (ed.), *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-Butir Pemikiran*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006).

Suhadi, *Kebebasan akademik dan ancaman yang meningkat*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM, 2017).

Subakir, Ahmad, dkk, *Potret Buram Kebebasan beragama*, (Kediri; STAIN Kediri & Nadi Pustaka, 2010).

Talkhah, Imam, "Prolog", dalam Haidlor Ali. (ed.), *Survey Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013).

Ulum, Raudatul & Budiyo (Editor), *Survey Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2016*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2017).

Varshney, A. *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*, (London: Yale University Press, 2012).

-----, *Survey Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2015*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016).

The Wahid Institute, "Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan", [http://www.wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan\\_sementara\\_kbb2015.pdf](http://www.wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan_sementara_kbb2015.pdf)

Tim BPS Kota Kediri, *Kota Kediri dalam Angka; Kediri municipality in figures 2019*, (Kediri; BPS Kota Kediri, 2019).

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### Kuesioner Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri 2018

<hr/>	
<b>Jenis Kelamin:</b>	<b>Usia:</b>
<input type="checkbox"/> Pria	<input type="checkbox"/> 17-24 Tahun
<input type="checkbox"/> Wanita	<input type="checkbox"/> 25-34 Tahun
	<input type="checkbox"/> 35-49 Tahun
	<input type="checkbox"/> 50-64 Tahun
	<input type="checkbox"/> > 65
<hr/>	
<b>Profesi/Pekerjaan:</b>	<b>Agama:</b>
<input type="checkbox"/> Pelajar/mahasiswa	<input type="checkbox"/> Islam
<input type="checkbox"/> PNS/Pemerintahan/Politik	<input type="checkbox"/> Katolik
<input type="checkbox"/> Bisnis/Dagang	<input type="checkbox"/> Protestan
<input type="checkbox"/> Profesional (Dokter/Akademisi, dst.)	<input type="checkbox"/> Hindu
<input type="checkbox"/> Kepala/Ibu Rumah Tangga Saja	<input type="checkbox"/> Buddha
<input type="checkbox"/> Tidak Bekerja	<input type="checkbox"/> Konghucu
Lainnya:.....	Lainnya: .....
<hr/>	

#### Keterangan cara pengisian:

Berilah tanda centang (√) untuk setiap pernyataan ini yang sesuai dengan Anda.

**SS** = Sangat Setuju    **S** = Setuju    **N** = Netral    **TS** =

Tidak Setuju    **STS** = Sangat Tidak Setuju

Terima kasih atas partisipasi Anda!



No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
A	<b>Toleransi</b>					
1	Perbedaan agama merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat					
2	Agama yang saya anut mengajarkan saya untuk bersikap toleran atau menghargai agama lain					
3	Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan terhadap pemeluk agama lainnya					
4	Kegiatan radikalisme (kekerasan) dilarang dalam agama yang saya anut					
5	Konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan politik					
6	Konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan ekonomi					
7	Konflik antar umat beragama disebabkan karena egoisme masing-masing pemeluk agama					
8	Syah dan Ahmadiyah adalah sesat dan bukan bagian dari Islam					
9	Saya bersedia bertetangga dengan pemeluk agama lain					
10	Saya bersedia bersahabat dan bergaul dengan pemeluk agama lain					
11	Saya bersedia menikah dengan pemeluk agama lain					
12	Dalam melakukan hubungan sosial, saya tidak pernah membedakan seseorang berdasarkan agamanya					
13	Saya tidak keberatan apabila pemeluk agama lain membangun tempat peribadatnya di lingkungan tempat tinggal saya					
14	Saya pernah mengunjungi tempat ibadah agama lain					
15	Saya pernah berselisih paham dengan pemeluk agama lain					

<b>B</b>	<b>Kesetaraan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
16	Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing merupakan bagian dari hak asasi manusia					
17	Memeluk agama merupakan bagian dari hak asasi manusia					
18	Setiap penganut agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing					
19	Setiap penganut agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing					
20	Menyebarkan agama kepada penganut agama lain diperbolehkan					
21	Setiap penganut agama punya hak politik dan hukum yang sama					
22	Penodaan terhadap agama apapun harus dihukum penjara					
23	Semua umat beragama di Indonesia berkedudukan sama					
24	Umat agama yang lebih kecil harus mengalah kepada umat agama yang lebih besar					
25	Saya tidak berkeberatan jika jabatan publik dipegang oleh penganut agama lain					
26	Saya bersedia terbuka (mengizinkan) kegiatan keagamaan lain di lingkungan saya					
27	Saya bersedia melindungi agama lain					
28	Saya menegur teman saya yang menghina agama lain					

<b>C</b>	<b>Kerjasama</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
29	Saya tahu keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Kediri					
30	Dialog lintas agama penting untuk memelihara kerukunan umat beragama					
31	Saya bersedia mengundang pemeluk agama lain dalam kegiatan (misalnya kegiatan syukuran, pesta, dan lain sebagainya) yang saya lakukan					
32	Saya bersedia menghadiri undangan dari pemeluk agama lain					
33	Saya bersedia memberikan sumbangan kepada pemeluk agama lain yang memerlukannya					
34	Saya bersedia melakukan hubungan kerja dengan pemeluk agama lain					
35	Saya bersedia membantu pemeluk agama lain untuk membangun rumah ibadahnya					
36	Saya bersedia berdialog dan musyawarah dengan orang berbeda agama					
37	Saya bersedia ikut dalam kegiatan doa bersama dengan agama lain					
38	Saya aktif dalam organisasi keagamaan di tingkat lokal/nasional					
39	Saya aktif dalam organisasi/perkumpulan lintas agama					

<b>D</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
40	Pemerintah Kota Kediri memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dengan baik					
41	Pemerintah Kota Kediri melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan dengan baik					
42	Pemerintah Kota Kediri memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan di kota Kediri dengan baik					

43	Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya				
44	Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama				
45	Pemerintah Kota Kediri memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik				
46	Pemerintah Kota Kediri sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai agama				
47	Pemerintah Kota Kediri bersikap tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama				
48	Pemerintah Kota Kediri bersikap tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama				
49	Pemerintah Kota Kediri bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama				
50	Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama				
51	Banyak kebijakan Pemerintah RI saat ini tidak memihak kepada agama yang saya anut.				
52	Alasan agama menjadi pertimbangan utama saya dalam memilih calon presiden dan calon legislative pada Pemilu Tahun 2019				
53	Saya ikut membagikan (share) berita di media sosial ( Facebook atau Whatsapp) yang isinya mendiskreditkan/menjelek-jelekkan calon presiden pilihan saya pada pemilu Tahun 2019, sekalipun saya tidak yakin berita itu benar atau bohong (hoax)				





